

BAGIAN ANGGARAN 087



LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(AUDITED)



Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Jakarta Selatan

BAGIAN ANGGARAN 087



LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (AUDITED)

Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Jakarta Selatan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ANRI Tahun Anggaran 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada ANRI. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Jakarta, 30 April 2014

Sekretaris Utama,



Gina Masudah Husni

NIP. 19550701 198303 2 001

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	iii
Pernyataan Telah Direviu.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vi
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca.....	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan.....	6
A. Penjelasan Umum.....	6
A.1. Dasar Hukum.....	6
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis.....	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	32
B.2. Belanja Negara.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap.....	45
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	51
C.4. Aset Lainnya.....	52
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	54
C.6. Ekuitas Dana Lancar.....	55
C.7. Ekuitas Dana Investasi.....	56
D. Pengungkapan Penting Lainnya.....	57
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.....	57
D.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	68
D.3. Rekening Pemerintah	70
D.4. Pengungkapan Lain-lain	70
Laporan-laporan Pendukung	
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012	2
Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	24
Tabel 4 : Penggolongan Kualitas Piutang	30
Tabel 5 : Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	31
Tabel 6 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan	32
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012	33
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013	34
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Belanja TA 2013	35
Tabel 10 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Pusat TA 2013	35
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Daerah TA 2013	35
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Dekonsentrasi TA 2013	36
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Dekonsentrasi TA 2013 per Satker	36
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012	38
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan 2012	38
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan 2012	39
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012	40
Tabel 18 : Rincian Aset Lancar TA 2013 dan 2012	41
Tabel 19 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2013 dan 2012	41
Tabel 20 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	42
Tabel 21 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	42
Tabel 22 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2013 dan 2012	42
Tabel 23 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	43
Tabel 24 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	43
Tabel 25 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	44
Tabel 26 : Rincian Persediaan	45
Tabel 27 : Rincian Aset Tetap	45
Tabel 28 : Rincian Aset Lainnya	52
Tabel 29 : Rincian Aset Tak Berwujud	53
Tabel 30 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek	54
Tabel 31 : Rincian Utang Pihak Ketiga	55
Tabel 32 : Rincian Ekuitas Dana Lancar	56
Tabel 33 : Rincian Ekuitas Dana Investasi	57
Lampiran : Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset A1 Tetap	
Lampiran : Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual A2	

- Lampiran : Rekening ANRI
A3
- Lampiran : Laporan Hasil Pemantauan Atas TLHP BPK-RI
A4
- Lampiran : Matriks Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pemantauan Atas TLHP
A5 BPK-RI
- Lampiran : Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI Tahun
A6 2012
- Lampiran : Rencana Tindak Temuan Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2012
A7
- Lampiran
lainnya

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2013 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



Jakarta, 27 Februari 2014

Sekretaris Utama,

Gina Masudah Husni

Gina Masudah Husni

NIP 19550701 198303 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2013 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 7.884.334.819,00 atau mencapai 111,85 % dari estimasi pendapatan sebesar Rp7.048.950.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp 153.609.591.291,00 atau mencapai 87,60 % dari alokasi anggaran sebesar Rp175.358.688.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	7.048.950.000,00	7.884.334.819,00	111,85	7.863.573.309,00
Belanja Negara	175.358.688.000,00	153.609.591.291,00	87,60	122.172.427.640,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp 415.015.932.416,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp1.825.105.177,00, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 398.625.228.094,00, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 14.565.599.145,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 2.024.031.000,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 412.991.901.416,00, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp198.925.823,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 413.190.827.239,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (penurunan)	
	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	1.825.105.177	2.932.086.085	(1.106.980.908)	(37,75)
Aset Tetap	398.625.228.094	569.940.089.786	(171.314.861.692)	(30,06)
Piutang Jangka Panjang	0	1.966.307	(1.966.307)	(100,00)
Aset Lainnya	14.565.599.145	12.947.021.524	1.618.577.621	12,50
Jumlah Aset	415.015.932.416	585.821.163.702	(170.805.231.286)	(29,16)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	2.024.031.000	2.375.151.749	(351.120.749)	(14,78)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	(198.925.823)	556.934.336	(755.860.159)	(64,28)
Ekuitas Dana Investasi	413.190.827.239	582.889.077.617	(169.698.250.378)	(29,11)
Jumlah Ekuitas Dana	412.991.901.416	583.446.011.953	(170.454.110.537)	(29,22)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	415.015.932.416	585.821.163.702	(170.805.231.286)	(29,16)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 April 2014

Kepala,



Mustari Irawan

NIP 195906211987031 001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

URAIAN	CATATAN	TA 2013		% thd Anggaran	TA 2012
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	7.048.950.000	7.884.334.819	111,85	7.863.573.309
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah		7.048.950.000	7.884.334.819	111,85	7.863.573.309
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	55.896.980.000	50.092.684.216	89,62	50.065.592.333
2. Belanja Barang	B.2.2.	79.616.105.000	72.785.406.626	91,42	62.624.676.422
3. Belanja Modal	B.2.3.	39.845.603.000	30.731.500.449	77,13	9.482.158.885
Jumlah Belanja Negara		175.358.688.000	153.609.591.291	87,60	122.172.427.640

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2012
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp 118.300	Rp 11.940.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp 0	Rp 343.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp 1.534.414.400	Rp 1.681.755.000
Jumlah Kas dan Bank		Rp 1.534.532.700	Rp 2.036.695.000
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	Rp 0	Rp 223.150.531
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	Rp 0	Rp (1.115.752)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	Rp 1.976.188	Rp 2.964.288
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	C.1.7	Rp (9.881)	Rp (14.821)
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 1.966.307	Rp 224.984.246
Persediaan	C.1.8	Rp 288.606.170	Rp 670.406.839
Jumlah Aset Lancar		Rp 1.825.105.177	Rp 2.932.086.085
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2.1	Rp 215.554.860.396	Rp 215.554.860.396
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp 171.558.428.270	Rp 157.278.538.416
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp 188.514.743.536	Rp 175.871.756.557
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp 16.240.117.839	Rp 13.419.676.529
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	Rp 7.924.247.888	Rp 7.815.257.888
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	Rp (201.167.169.835)	Rp 0
Jumlah Aset Tetap		Rp 398.625.228.094	Rp 569.940.089.786
Piutang Jangka Panjang			
C.3			
TP/TGR	C.3.1	Rp 0	Rp 1.976.188
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.2	Rp 0	Rp (9.881)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		Rp 0	Rp 1.966.307
Aset Lainnya			
C.4			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	Rp 14.565.599.145	Rp 12.659.577.325
Aset Lain-Lain	C.4.2	Rp 287.444.199	Rp 287.444.199
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	Rp (287.444.199)	Rp 0
Jumlah Aset Lainnya		Rp 14.565.599.145	Rp 12.947.021.524
JUMLAH ASET		Rp 415.015.932.416	Rp 585.821.163.702
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp 2.023.912.700	Rp 2.020.211.749
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	Rp 118.300	Rp 11.940.000
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	Rp 0	Rp 343.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 2.024.031.000	Rp 2.375.151.749
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 2.024.031.000	Rp 2.375.151.749
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
C.6			
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp 1.966.307	Rp 224.984.246
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 288.606.170	Rp 670.406.839
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	Rp (489.498.300)	Rp (338.456.749)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		Rp (198.925.823)	Rp 556.934.336
Ekuitas Dana Investasi			
C.7			
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 398.625.228.094	Rp 569.940.089.786
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 14.565.599.145	Rp 12.948.987.831
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		Rp 413.190.827.239	Rp 582.889.077.617
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 412.991.901.416	Rp 583.446.011.953
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 415.015.932.416	Rp 585.821.163.702

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Nerca pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Visi dan Misi

VISI DAN MISI

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah **“Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025”**. Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;

- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
2. Penetapan dan penyelenggraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
 - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Organisasi

ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan

Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat. Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas, yaitu:

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI.

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Hukum dan Kepegawaian;
 - c. Biro Umum.
2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas:

- a. Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan;
 - b. Direktorat Kearsipan Pusat;
 - c. Direktorat Kearsipan Daerah.
3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional.

Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas:

- a. Direktorat Akuisisi;
 - b. Direktorat Pengolahan;
 - c. Direktorat Preservasi;
 - d. Direktorat Pemanfaatan.
4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari:

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan.

Selain itu terdapat tiga unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat, dengan tugas sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.
2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan.
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan ANRI posisi per **31 Desember 2013** adalah sebagai berikut :

1. Kepala : Mustari Irawan
2. Sekretaris Utama : Gina Masudah Husni
3. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan : Andi Kasman
4. Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip : Mustari Irawan
5. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan : Dini Saraswati

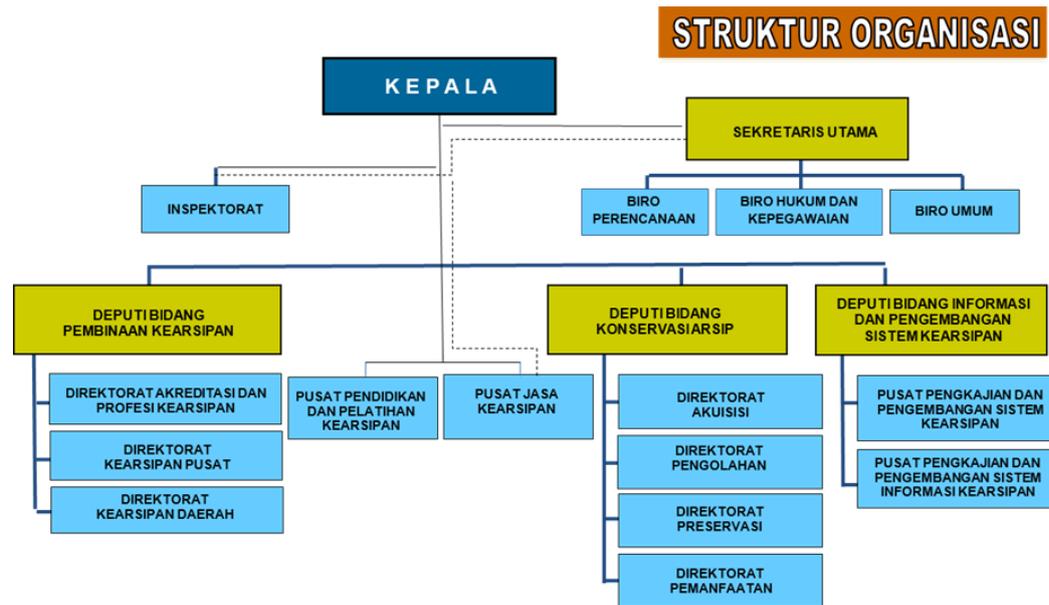
Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI posisi per **31 Desember 2013** adalah sebanyak **506 orang**.

Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	%
I	JABATAN		
	<i>STRUKTURAL :</i>		
	- Eselon I	4 Orang	0,79
	- Eselon II	14 Orang	2,77
	- Eselon III	40 Orang	7,91
	- Eselon IV	51 Orang	10,08
	<i>JUMLAH STRUKTURAL</i>	<i>109 Orang</i>	<i>21,55</i>
II	FUNGSIONAL :		
	<i>FUNGSIONAL TERTENTU :</i>		
	- Arsiparis	154 Orang	30,43
	- Perancang Peraturan Perundang-undangan	1 Orang	0,20

	- Perencana	2	Orang	0,40
	- Analis Kepegawaian	8	Orang	1,58
	- Auditor	9	Orang	1,78
	- Widyaiswara	4	Orang	0,79
	- Peneliti	1	Orang	0,20
	- Pustakawan	2	Orang	0,40
	- Pranata Komputer	21	Orang	4,15
	- Perawat	2	Orang	0,40
	- Penerjemah	1	Orang	0,20
	JUMLAH FUNGSIONAL TERTENTU	205	Orang	40,51
	FUNGSIONAL UMUM:			
	- Fungsional Umum	192	Orang	37,94
	JUMLAH FUNGSIONAL	397	Orang	78,46
	JUMLAH	506	Orang	100,00
IV	GOLONGAN			
	- Gol. IV	97	Orang	19,17
	- Gol. III	329	Orang	65,02
	- Gol. II	80	Orang	15,81
	JUMLAH	506	Orang	100,00
V	PENDIDIKAN			
	- Strata 3 (S3)	3	Orang	0,59
	- Strata 2 (S2)	79	Orang	15,61
NO	URAIAN	JUMLAH		%
	- Strata 1 (S1)	238	Orang	47,04
	- Diploma /Sarmud	90	Orang	18,82
	- SLTA	93	Orang	17,79
	- SLTP	3	Orang	0,59
	- SD	-	Orang	0,0
	JUMLAH	506	Orang	100,0

Adapun struktur organisasi ANRI sebagai berikut :



Tujuan dan sasaran Strategis

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2010-2014

Dalam rangka terwujudnya pencapaian Visi dan Misi tersebut di atas, kebijakan Pembangunan Jangka Menengah di bidang kearsipan dituangkan dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 03ETahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ANRI Tahun 2013.

1. Tujuan

Tujuan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi ANRI adalah:

- a. Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya;
- c. Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional yang berbasis TIK secara komprehensif dan terpadu;
- d. Mewujudkan Birokrasi yang Modern di ANRI.

2. Sasaran Strategis

Fokus prioritas Pembangunan Kearsipan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 03E Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014 adalah mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan kearsipan 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk:

a. Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya (T1);

Sasaran Strategis:

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif;
- 2) Terwujudnya organisasi kearsipan yang proporsional, efektif dan efisien;
- 3) Terwujudnya SDM kearsipan yang kompeten dan profesional.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya (T2);

Sasaran Strategis:

- 1) Terwujudnya efektifitas penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik;
- 2) Terwujudnya Lembaga Negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pemusnahan arsip.

c. Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan system informasi kearsipan nasional yang berbasis TIK secara komprehensif dan terpadu (T3);

Sasaran Strategis :

- 1) Terwujudnya hasil kajian kearsipan yang berkualitas;
- 2) Terwujudnya peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan.

d. Mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI (T4);

Sasaran Strategis:

- 1) Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel.

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEARSIPAN
TAHUN 2010-2014**

1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis Pertama (T1)

Untuk mencapai tujuan strategis pertama yaitu mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut:

a. Strategi

Untuk mencapai Tujuan strategis pertama sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksana supervisi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif dan peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang

disupervisi;

- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa;
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM kearsipan;
- 5) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional arsiparis.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong dan memfasilitasi penerapan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis pada pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi;
- 2) Mendorong dan memfasilitasi pembuatan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA), serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip pada lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri;
- 3) Mendorong dan memfasilitasi penyediaan akses arsip dinamis bagi pengguna arsip pada lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Mendorong dan memfasilitasi pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu arsip terjaga dan arsip umum pada lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pemberkasan dan pelaporan lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri kepada ANRI terkait arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, masalah pemerintahan yang strategis;

- 6) Mendorong dan memfasilitasi penyerahan salinan autentik arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, masalah pemerintahan yang strategis dari lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri kepada ANRI;
- 7) Mendorong dan memfasilitasi lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri terkait dengan pelaksanaan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan arsip dinamis sesuai dengan pedoman penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip;
- 8) Mendorong dan memfasilitasi lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri dalam hal pelaksanaan penyusutan arsip berdasarkan pedoman penyusutan arsip;
- 9) Mendorong dan memfasilitasi lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka pembuatan program arsip vital sesuai dengan pedoman program arsip vital;
- 10) Mendorong dan memfasilitasi lembaga kearsipan dalam rangka memiliki Daftar Pencarian Arsip (DPA);
- 11) Mendorong dan memfasilitasi lembaga kearsipan dalam rangka penyediaan kemudahan akses arsip statis kepada pengguna arsip;
- 12) Mendorong dan memfasilitasi seluruh Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri untuk dapat memiliki unit kearsipan;
- 13) Mendorong dan memfasilitasi seluruh Perguruan Tinggi Negeri untuk dapat memiliki lembaga kearsipan perguruan tinggi (*University Archives*).
- 14) Mendorong dan memfasilitasi Arsiparis dan SDM kearsipan dalam rangka memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalitas;

- 15) Mendorong dan memfasilitasi lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeridalam untuk mendapatkan Akreditasi Kearsipan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis Kedua (T2)

Untuk mencapai tujuan strategis kedua yaitumeningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya,maka ditetapkanstrategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan strategis kedua sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi massa, dan partai politik;
- 2) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;
- 3) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya *server storage* arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khasanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, guna melestarikan nilai guna arsip yang terkandung di dalamnya;

- 4) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong dan memfasilitasi penyelamatan arsip statis lembaga negara;
- 2) Mendorong dan memfasilitasi penyelamatan arsip statis perusahaan berskala nasional;
- 3) Mendorong dan memfasilitasi penyelamatan arsip statis Ormas/Orpol dan Perseorangan berskala nasional;
- 4) Mendorong dan memfasilitasi pendataan arsip terjaga pada lembaga Negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Mendorong dan memfasilitasi persetujuan pemusnahan arsip pada instansi lembaga negara;
- 6) Mendorong dan memfasilitasi persetujuan pemusnahan arsip instansi pemerintah daerah;
- 7) Mendorong dan memfasilitasi persetujuan Pemusnahan Arsip Perusahaan per tahun;
- 8) Mendorong dan memfasilitasi pengidentifikasian arsip dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan dapat diumumkan kepada publik;
- 9) Mendorong dan memfasilitasi pengolahan arsip sebelum tahun 1945 ke dalam bentuk daftar, inventaris dan/atau guide arsip;
- 10) Mendorong dan memfasilitasi pengolahan arsip setelah tahun 1945 ke dalam bentuk daftar, inventaris dan/atau guide arsip;
- 11) Mendorong dan memfasilitasi pengolahan arsip Kartografi dan Kearsitekturan ke dalam bentuk daftar, inventaris

- dan/atau guide arsip;
- 12) Mendorong dan memfasilitasi pengolahan arsip Media Baru ke dalam bentuk daftar, inventaris dan/atau guide arsip;
 - 13) Mendorong dan memfasilitasi pengolahan arsip perbatasan ke dalam bentuk guide arsip;
 - 14) Mendorong dan memfasilitasi pencapaian *Surveillance Audit* ISO 9001 : 2008 Pengolahan Arsip Statis;
 - 15) Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian manajemen mutu penyimpanan dan pemeliharaan arsip sesuai ISO 9001:2008;
 - 16) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan layanan arsip statis berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan terjaminnya kesediaan arsip dalam waktu 30 menit, maksimal 24.000 nomor per tahun;

3. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis Ketiga (T3)

Untuk mencapai tujuan strategis ketiga yaitu terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan sistem kearsipan nasional dan pengelolaan system informasi kearsipan nasional yang berbasis TIK secara komprehensif dan terpadu, maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan strategis ketiga sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan kajian kebijakan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kearsipan yang dapat menjadi pedoman implementasi bagi para perencana dan pengambil keputusan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- 2) Mengembangkan kegiatan pengkajian dan pengembangan serta mendukung program pendidikan lanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber

daya manusia;

- 3) Menciptakan dan mengembangkan paket teknologi dan model sistem informasi kearsipan sebagai salah satu kontribusi lembaga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan kearsipan nasional;
- 4) Mengembangkan diri sebagai pusat unggulan melalui diseminasi dan sosialisasi hasil kajian serta menciptakan jaringan dan peluang kerja sama;
- 5) Melaksanakan kegiatan secara optimal agar mampu memberikan *outcome* terbaik bagi lembaga sebagai salah satu bentuk keprofesionalan lembaga.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong dan memfasilitasi penyusunan bahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan kearsipan nasional;
- 2) Mendorong dan memfasilitasi pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan lembaga kearsipan perguruan tinggi;
- 3) Mendorong dan memfasilitasi lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada lembaga pencipta dalam rangka *upload* data informasi arsip statis pada JIKN.

4. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis keempat (T4)

Untuk mencapai tujuan strategis keempat mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI, maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan strategis keempat sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh pada seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
- 5) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kearsipan melalui beasiswa S1,S2,S3, dan diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;
- 7) Meningkatkan promosi layanan pusat jasa kearsipan secara terus menerus pada instansi pemerintah dan swasta;
- 8) Meningkatkan kualitas pusat jasa kearsipan dalam membenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta;
- 9) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan jumlah pengunjung Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa pertahun;
- 2) Mendorong dan memfasilitasi upaya mendapatkan penilaian kinerja LAKIP ANRI sekurang-kurangnya

- mendapat skor B untuk penilaian mulai tahun 2011-2014;
- 3) Mendorong dan memfasilitasi penyusunan NSPK penyelenggaran kearsipan nasional;
 - 4) Mendorong dan memfasilitasi pencapaian Opini audit BPK-RI atas laporan keuangan ANRI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2010-2014.

Sasaran
Pembangunan
Bidang Kearsipan
Tahun 2013

SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2013

Bertitik tolak dari sasaran Pembangunan Kearsipan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 03E Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013 secara garis besar adalah:

1. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada 5 Daerah;
2. Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis TIK (SIKD-TIK) pada 27 Instansi Pusat dan 17 Lembaga Kearsipan Daerah;
3. Terlaksananya Bimbingan Pengelolaan Arsip Asset yang diselenggarakan pada 23 Provinsi dengan Peserta 315 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada 9 Pemerintah Daerah Provinsi dan 85 Instansi Pusat;
5. Terlaksananya Sertifikasi SDM Kearsipan sebanyak 105 peserta;
6. Terlaksananya Monitoring dan Penyelamatan Arsip Pemilu Tahun 2009 di 10 Instansi;
7. Terlaksananya akuisisi arsip perbatasan 6 daerah, pengolahan 1 guide arsip dan preservasi arsip perbatasan 30.683 reel/roll/lembar/kaset.
8. Terlaksananya Penilaian dan Akuisisi Arsip Kabinet Indonesia Bersatu di 15 instansi;
9. Terlaksananya Digitalisasi Arsip sebanyak 181 Reel film, 340 roll microfilm, 8.500 lembar, 10.979 kertas/peta;
10. Terlaksananya Digitalisasi Dan *Up Load* Dalam Rangka *Center Of Excellent*;
11. Penyelarasan dan Evaluasi Pada Unit Kerja di ANRI terhadap 15

- SOP;
12. Terselenggaranya Diklat Teknis Bagi Sekretaris Desa melalui Dana Dekonsentrasipada 33Provinsi, Diklat Penciptaan Arsiparis 4Angkatan dan Diklat Penjenjangan 1 Angkatan;
 13. Tersedianya Pemberian Bantuan Beasiswa untuk Program Studi Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 86orang.
 14. Terlaksananya sosialisasi Diorama Sejarah Perjalananan Bangsa sebanyak 2kali *talk show* di televisi, pembuatan iklan 1paket, 15 kali penyiaran di televisi;2 kali sosialisasi melalui media cetak; Sosialisasi melalui media elektronik (radio) sebanyak 2kali *talk show*di radio, pembuatan iklan 1paket dan 20 kali penyiaran melalui radio.
 15. Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan ANRI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedural manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan ANRI Tahun 2013 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural dibawah ANRI seperti eselon I, serta satuan kerja (Satker) yang bertanggungjawab atas anggaran yang dilaksanakan.

Jumlah satker dilingkup ANRI adalah 35 (tiga puluh lima) satker yang terdiri atas 1 (satu) satker Kantor Pusat/KP, 1(satu) satker Kantor Daerah/KD dan 33 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi/DK.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	01	Arsip Nasional	1	1	33	-	35
Jumlah			1	1	33	-	35

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ANRI adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

*Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

*Tabel 4
Penggolongan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp7.884.334.819

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 7.884.334.819,00 atau mencapai 111,85 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 7.048.950.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2013		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan & Hasil Cetakannya Lainnya	453.950.000	277.987.900	61,23
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	15.000.000	8.100.000	54,00
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	1.441.950.000	144,19
4	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan teknologi Sesuai Tusi Masing-masing Kementerian	515.000.000	533.325.000	103,55
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.000.000	0	0,00
6	Pendapatan Jasa Lainnya	5.000.000.000	5.265.184.919	105,30
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1.260.299	0,00
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	50.000.000	249.700.509	499,40
9	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	97.318.361	0,00
10	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	10.000.000	9.487.288	94,87
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	20.543	0,00
Jumlah		7.048.950.000	7.884.334.819	111,85

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp 20.741.207,00 atau 0,26 % dibandingkan Tahun Anggaran 2012 yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan sewa gedung dan penerimaan kembali belanja lainnya TAYL pada ANRI. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012

No	Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan & Hasil Cetakan Lainnya	277.987.900	333.518.700	(55.530.800)	(16,65)
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya.	8.100.000	2.500.000	5.600.000	224,00
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.	1.441.950.000	2.799.000.000	(1.357.050.000)	(48,48)
4	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan & Teknologi sesuai Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian.	533.325.000	481.500.000	51.825.000	10,76
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	2.055.300	(2.045.261)	(0,00)
6	Pendapatan Jasa Lainnya	5.265.184.919	3.237.593.535	2.027.591.384	62,63
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.260.299	1.689.875	(429.576)	(25,42)
8	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat	249.700.509	11.140.134	238.560.375	2.141,45
9	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	97.318.361	989.438.669	(892.120.308)	(90,16)
10	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	9.487.288	4.987.096	4.500.192	90,24
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	20.543	150.000	(149.760)	(99,84)
Jumlah		7.884.334.819	7.863.573.309	(20.761.510)	(0,26)

Adapun realisasi PNBP Tahun Anggaran 2013 meliputi:

1. PNBP Satker Kantor Pusat (ANRI Jakarta) dengan realisasi sebesar Rp 7.858.590.276,00 atau sebesar 111,48% dari estimasi pendapatan sebesar Rp7.048.950.000,00;
2. PNBP Satker Dekonsentrasi pada Badan/Kantor Arsip Daerah Provinsi realisasi sebesar Rp 25.744.543,00, dengan rincian :
 - a. Provinsi DKI Jakarta (0100) sebesar Rp 20.303,00
 - b. Provinsi DI Yogyakarta (0400) sebesar Rp 2.589.200,00
 - c. Provinsi D.I. Aceh (0600) sebesar Rp 2.065.000,00
 - d. Provinsi Riau (0900) sebesar Rp 906.700,00

- e. Provinsi Kalimantan Tengah (1400) sebesar Rp 300.000,00
- f. Provinsi Kalimantan Selatan (1500) sebesar Rp 812.700,00
- g. Provinsi Kalimantan Timur (1600) sebesar Rp 2.840.600,00
- h. Provinsi Sulawesi Utara (1700) sebesar Rp 400.000,00
- i. Provinsi Sulawesi Tengah (1800) sebesar Rp 1.127.000,00
- j. Provinsi Sulawesi Selatan (1900) sebesar Rp 50.000,00
- k. Provinsi Sulawesi Tenggara (2000) sebesar Rp 1.842.600,00
- l. Provinsi Maluku (2100) sebesar Rp 5.643.200,00
- m. Provinsi Nusa Tenggara Barat (2300) sebesar Rp 124.040,00
- n. Provinsi Irian Jaya (2500) sebesar Rp 900.000,00
- o. Provinsi Bengkulu (2600) sebesar Rp 6.123.000,00
- p. Provinsi Bangka Belitung (3000) sebesar Rp 200,00.

B.2 Belanja Negara

Realisasi
Belanja Negara
Rp153.609.591.291

Realisasi belanja ANRI pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 153.609.591.291,00 atau sebesar 87,60 % dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran ANRI Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 175.358.688.000,00. Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013

Realisasi
Belanja Negara
Per Program

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
087.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	89.874.146.000	82.564.864.430	91,87
087.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	35.675.537.000	26.991.867.279	75,66
087.01.06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	49.809.005.000	44.052.960.782	88,44
Jumlah		175.358.688.000	153.609.591.291	87,60

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi
Belanja Negara
Perbelanja

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Belanja TA 2013

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	55.896.980.000	50.092.684.216	89,62
52	Belanja Barang	79.616.105.000	72.785.406.626	91,42
53	Belanja Modal	39.845.603.000	30.731.500.449	77,13
Jumlah		175.358.688.000	153.609.591.291	87,60

Realisasi
Belanja Satker
Pusat
Rp145.631.127.688

Realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja pusat Tahun Anggaran 2013 meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar Rp 145.631.127.688,00 atau 87,17 % dari pagu anggaran sebesar Rp 167.058.688.000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
Satuan Kerja Pusat

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	55.896.980.000	50.092.684.216	89,62
52	Belanja Barang	71.826.225.000	65.308.045.573	90,93
53	Belanja Modal	39.335.483.000	30.230.397.899	76,85
Jumlah		167.058.688.000	145.631.127.688	87,17

Realisasi
Belanja Satker
Daerah
Rp 2.615.264.428

Realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja daerah Tahun Anggaran 2013 meliputi belanja barang dan belanja modal sebesar Rp 2.615.264.428,0 atau 96,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp 2.700.000.000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
Satuan Kerja Daerah

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
52	Belanja Barang	2.189.880.000	2.114.161.878	96,54
53	Belanja Modal	510.120.000	501.102.550	98,23
Jumlah		2.700.000.000	2.615.264.428	96,86

Belanja Satuan
Kerja Daerah
menurut Jenis
Belanja

Realisasi
Belanja Satker
Dana
Dekonsentrasi
Rp5.363.199.175

Sementara realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 pada Badan/Kantor Kearsipan meliputi belanja barang sebesar Rp 5.363.199.175,00 atau 95,77 % dari pagu anggaran sebesar Rp 5.600.000.000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Belanja Satker
Dana
Dekonsentrasi
menurut Jenis
Belanja

Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
Satuan Kerja Dekonsentrasi

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
52	Belanja Barang	5.600.000.000	5.363.199.175	95,77
Jumlah		5.600.000.000	5.363.199.175	95,77

Realisasi
Belanja Per
Satker Dana
Dekonsentrasi

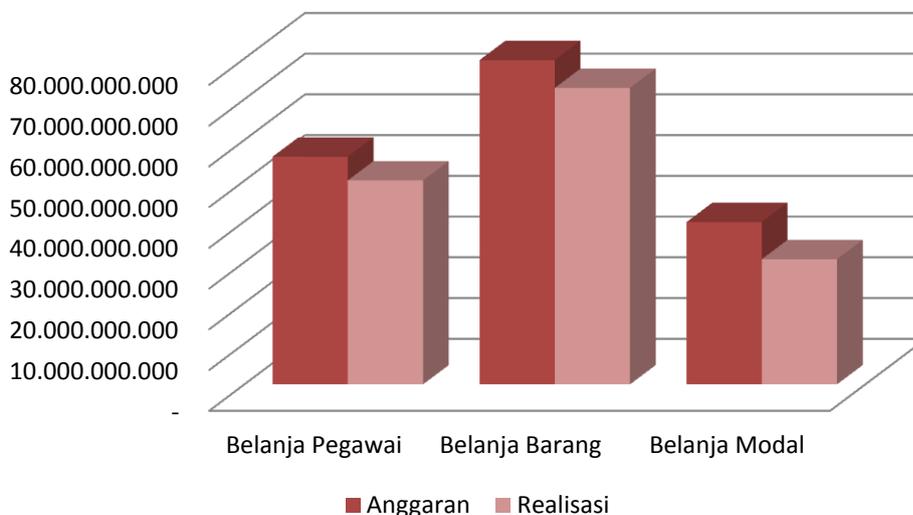
Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
Per Satuan Kerja Dekonsentrasi

No.	Uraian Satker	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Provinsi DKI Jakarta	170.000.000	156.930.000	92,31
2	Provinsi Jawa Barat	177.466.000	172.912.000	97,43
3	Provinsi Jawa Tengah	175.657.000	173.449.600	98,74
4	Provinsi DI. Yogyakarta	154.791.000	149.692.900	96,71
5	Provinsi Jawa Timur	167.706.000	157.482.625	93,90
6	Provinsi DI. Aceh	168.291.000	152.199.200	90,44
7	Provinsi Sumatera Utara	160.966.000	147.460.100	91,61
8	Provinsi Sumatera Barat	163.351.000	157.787.900	96,59
9	Provinsi Riau	180.031.000	173.033.200	96,11
10	Provinsi Jambi	154.417.000	150.960.100	97,76
11	Provinsi Sumatera Selatan	156.026.000	152.619.800	97,82
12	Provinsi Lampung	149.413.000	140.806.800	94,24
13	Provinsi Kalimantan Barat	169.106.000	168.850.300	99,85
14	Provinsi Kalimantan Tengah	157.171.000	153.684.900	97,78
15	Provinsi Kalimantan Selatan	167.291.000	142.824.700	85,38
16	Provinsi Kalimantan Timur	177.596.000	166.711.600	93,87
17	Provinsi Sulawesi Utara	201.846.000	191.586.000	94,92

18	Provinsi Sulawesi Tengah	167.856.000	165.996.000	98,89
19	Provinsi Sulawesi Selatan	197.041.000	197.041.000	100,00
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	149.951.000	141.947.200	94,66
21	Provinsi Maluku	180.066.000	160.201.300	88,97
22	Provinsi Bali	194.990.000	188.447.200	96,64
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	164.046.000	150.426.300	91,70
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	173.316.000	172.030.400	99,26
25	Provinsi Irian Jaya	180.541.000	179.630.000	99,50
26	Provinsi Bengkulu	152.476.000	146.306.100	95,95
27	Provinsi Maluku Utara	149.576.000	146.579.700	98,45
28	Provinsi Banten	166.436.000	158.868.000	95,45
29	Provinsi Bangka Belitung	170.726.000	167.441.100	98,78
30	Provinsi Gorontalo	166.936.000	152.816.800	91,54
31	Provinsi Kepulauan Riau	156.041.000	147.599.350	94,59
32	Provinsi Papua Barat	193.716.000	193.716.000	100,00
33	Provinsi Sulawesi Barat	185.161.000	185.161.000	100,00
Jumlah		5.600.000.000	5.363.199.175	95,77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.31.437.163.651,00 atau 25,73 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja perjalanan dan belanja modal gedung dan bangunan. Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2013	TA 2012	Rp	%
51	Belanja Pegawai	50.092.684.216	50.065.592.333	27.091.883	0,05
52	Belanja Barang	72.785.406.626	62.624.676.422	10.160.730.204	16,22
53	Belanja Modal	30.731.500.449	9.482.158.885	21.249.341.564	224,10
Jumlah		153.609.591.291	122.172.427.640	31.437.163.651	25,73

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp50.092.684.216

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 50.092.684.216,00 dan Rp 50.065.592.333,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 0,05 % antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan serta adanya tunjangan kinerja pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Uraian Belanja	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	18.494.505.320	17.511.568.180	982.937.140	5,61
Belanja Pembulatan Gaji PNS	464.864	349.944	114.920	32,84
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.296.506.200	1.196.233.382	100.272.818	8,38
Belanja Tunj. Anak PNS	366.571.550	335.426.644	31.144.906	9,29
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.867.710.000	1.885.850.000	(18.140.000)	(0,96)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	955.145.000	820.825.000	134.320.000	16,36
Belanja Tunj. PPh PNS	633.753.153	814.080.822	(180.327.669)	(22,15)
Belanja Tunj. Beras PNS	1.116.939.120	987.961.800	128.977.320	13,05
Belanja Uang Makan PNS	2.613.129.000	2.836.056.000	(222.927.000)	(7,86)
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	2.554.800.000	2.855.100.000	(300.300.000)	(10,52)
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	41.389.200	25.873.200	15.516.000	59,97

Belanja Tunj. Umum PNS	477.750.000	566.755.000	(89.005.000)	(15,70)
Belanja Uang Lembur	250.081.000	386.603.000	(136.522.000)	(35,31)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	19.979.758.750	19.852.357.522	127.401.228	0,64
Belanja Pegawai Transito	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	50.648.503.157	50.075.040.494	573.462.663	1,15
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>555.818.941</i>	<i>9.448.161</i>	<i>546.370.780</i>	<i>5.782,83</i>
Realisasi Belanja Netto	50.092.684.216	50.065.592.333	27.091.883	0,05

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
sebesar
Rp72.785.406.626

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 72.785.406.626,00 dan Rp62.624.676.422,00. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 16,22 persen antara lain disebabkan penurunan belanja barang jasa dan pemeliharaan. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

Uraian Belanja	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	5.711.714.771	4.661.072.277	1.050.642.494	22,54
Belanja Barang Non Operasional	30.806.322.221	29.626.144.923	1.180.177.298	3,98
Belanja Jasa	11.469.285.491	11.196.792.481	272.493.010	2,43
Belanja Pemeliharaan	3.947.540.020	4.859.478.270	(911.938.250)	(18,77)
Belanja Perjalanan Dinas	22.231.060.573	13.186.618.242	9.044.442.331	68,59
Realisasi Belanja Bruto	74.165.923.076	63.530.106.193	10.635.816.883	16,74
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>1.380.516.450</i>	<i>905.429.771</i>	<i>475.086.769</i>	<i>52,47</i>
Realisasi Belanja Netto	72.785.406.626	62.624.676.422	10.160.730.204	16,22

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
sebesar
Rp30.731.500.449

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 30.731.500.449,00 dan Rp9.482.158.885,00. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 224,10 % antara lain disebabkan kenaikan belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung bangunan dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

Uraian Belanja	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik/ (Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Tanah	0	48.200.000	(48.200.000)	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.789.493.200	4.180.737.350	3.608.755.850	86,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.418.920.019	3.827.254.400	12.591.665.619	329,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.313.225.410	0	4.313.225.410	0
Belanja Modal Lainnya	2.209.861.820	1.425.967.135	(75.674.440)	(100,00)
Realiasi Belanja Bruto	30.731.500.449	9.482.158.885	1.927.007.360	147,61
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	30.731.500.449	9.482.158.885	21.249.341.564	224,10

PENGEMBALIAN BELANJA

*Pengembalian
Belanja
Rp1.936.335.391*

Pada periode Tahun Anggaran 2013 ANRI dalam pelaksanaan anggarannya telah mengembalikan belanja sebesar Rp 1.936.335.391 yang berasal dari pengembalian belanja Satker Kantor Pusat (KP), Satker Kantor Daerah (KD) dan Satker Dekonsentrasi (DK).

Pengembalian belanja meliputi :

1. Pengembalian belanja Satker Kantor Pusat (ANRI Jakarta) sebesar Rp 1.914.822.991,00 pada belanja pegawai sebesar Rp 555.818.941,00 dan belanja barang Rp1.359.004.050,00;
2. Pengembalian belanja Satker Kantor Daerah (BATA) sebesar Rp 14.989.900,00 berupa pengembalian belanja barang;
3. Pengembalian belanja Satker Dekonsentrasi (Dana Dekonsentrasi Kearsipan) sebesar Rp 6.522.500,00 yaitu merupakan pengembalian belanja barang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 3.550.000,00
 - b. Badan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 6.000,00
 - c. Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 1.665.300,00
 - d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 1.200.000,00
 - e. Kantor Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 101.200,00.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp1.825.105.177

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.825.105.177,00 dan Rp2.932.086.085,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Arsip Nasional Republik Indonesia per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 118.300	Rp 11.940.000
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp 343.000.000
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 1.534.414.400	Rp 1.681.755.000
4	Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp 222.034.779
5	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp 1.966.307	Rp 2.949.467
6	Persediaan	Rp 288.606.170	Rp 670.406.839
	Jumlah	Rp 1.825.105.177	Rp 2.932.086.085

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp118.300

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 118.300,00 dan Rp11.940.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja (Satker) tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Uraian Satker	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/Penurunan
1	BPAD Prov. Banten	Rp -	Rp 12.000.000	Rp (12.000.000)
2	KAD Prov. Kep. Riau	Rp -	Rp (60.000)	Rp 60.000
5	BPAD Prov. NTB	Rp 118.300	Rp -	Rp 118.300
	Total	Rp 118.300	Rp 11.940.000	Rp (11.821.700)

Kas di Bendahara pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara dengan NTPN 0610120001050400 tanggal 5 Januari 2014. Kas di Bendahara pengeluaran tersebut meliputi Satker Dana Dekonsentrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian Satker	Saldo per 31 Des 2013	Uang Tunai/Bank	Kuitansi UP
1.	BPAD Prov. NTB	Rp 118.300	Rp 118.300	Rp -
	Total	Rp 118.300	Rp 118.300	Rp -

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp343.000.000,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Satker tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker

(dalam rupiah)

No	Uraian Satker	31 Desember 2013	31 Desember 2012	Kenaikan/Penurunan
1.	ANRI Jakarta	Rp -	Rp 343.000.000	Rp (343.000.000)
	Total	Rp -	Rp 343.000.000	Rp (343.000.000)

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp1.534.414.400

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.534.414.400,00 dan Rp1.681.755.000,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	TA 2013	TA 2012
1	Tunjangan Kinerja yang belum dibagikan	Rp 1.534.414.400	Rp 1.445.460.000
2	Uang Makan yang belum dibagikan	Rp -	Rp 236.295.000
	Jumlah	Rp 1.534.414.400	Rp 1.681.755.000

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker tersaji pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker

No	Uraian Satker	Jenis Transaksi	Jumlah
1	ANRI Jakarta	- Tunjangan Kinerja Desember 2013 yang belum dibagikan	Rp 1.534.414.400
Jumlah			Rp 1.534.414.400

Tunjangan kinerja bulan Desember 2013 telah dibayarkan kepada pegawai bulan Januari 2014 sebesar Rp1.493.759.837,00 dan sisanya disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 1400000908000808 tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp40.654.563,00 sebagai pengembalian belanja pegawai.

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp0

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp223.150.531,00 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.115.752,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang.

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bag. Lancar TP/TGR
Rp 1.976.188

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.976.188,00 dan Rp2.964.288,00 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Satker

No.	Satker	Jumlah Debitur	Jumlah
1	ANRI UPT BATA	1 orang	Rp1.976.188

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp4.940.476,00
Mutasi kurang:	
- Pembayaran TGR pada Satker ANRI BATA bln Januari s.d Desember 2013	Rp2.964.288,00
Jumlah Mutasi Kurang :	Rp2.964.288,00
Saldo per 31 Desember 2013	Rp1.976.188,00

Mutasi pengurangan sebesar Rp 2.964.288,00 merupakan pembayaran TGR pada Satker UPT Balai Arsip Tsunami Aceh (Januari s.d Desember 2013)

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bag. Lancar
TP/TGR Rp9.881

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 9.881,00 dan Rp 14.821,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk debitur yang berasal dari satker ANRI UPT BATA:

Tabel 25
Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	1.976.188	0,5%	9.881
Total			1.976.188		9.881

C.1.8 Persediaan

Persediaan
Rp288.606.170

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 288.606.170,00 dan Rp 670.406.839,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Persediaan

No.	Uraian	2013	2012
1	Barang Konsumsi	Rp 256.122.215	Rp 494.958.366
2	Barang Untuk Pemeliharaan	Rp 20.942.700	Rp 115.525.450
3	Suku Cadang	Rp -	Rp -
4	Bahan Baku	Rp 2.295.000	Rp 44.081.250
5	Persediaan Lainnya	Rp 9.246.255	Rp 15.841.773
Jumlah		Rp 288.606.170	Rp 670.406.839

Persediaan tersebut berasal dari hasil stock opname fisik akhir bulan Desember tahun 2013 pada gudang barang Satker ANRI Jakarta sebesar Rp253.428.670,00 dan Satker Balai Arsip Tsunami Aceh (BATA) sebesar Rp 35.177.500,00.

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp398.625.228.064

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp 398.625.228.094,00 dan Rp569.940.089.786,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap ANRI per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1	Tanah	215.554.860.396	215.554.860.396
2	Peralatan dan Mesin	171.558.428.270	157.278.538.416
3	Gedung dan Bangunan	188.514.743.536	175.871.756.557
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	16.240.117.839	13.419.676.529
5	Aset Tetap Lainnya	7.924.247.888	7.815.257.888
Jumlah		599.792.397.929	569.940.089.786
Akm. Penyusutan		201.167.169.835	0
Nilai Aset Tetap		398.625.228.094	569.940.089.786

C.2.1 Tanah

Tanah
Rp215.554.860.396

Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki ANRI per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 215.554.860.396, dan Rp215.554.860.396,00.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang, sehingga saldo tanah per 31 Desember 2013 seluas 32.625 m² atau senilai Rp215.554.860.396,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No.	KIB	Luas	Nilai
1	12120000	9.340 m2	111.146.000.000
2	12120001	18.245 m2	72.980.000.000
3	1220000	3.371 m2	25.042.860.000
4	1220000	979 m2	3.819.200.396
5	1220000	690 m2	2.566.800.000
Jumlah			215.554.860.396

- Tanah di Jl. Gajah Mada Jakarta Barat seluas 9.340 m² senilai Rp.111.146.000.000,00.
- Tanah di Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Timur Jakarta Selatan seluas 18.245 m² senilai Rp.72.980.000.000,00.
- Tanah di Jl. Ir. H. Juanda Bogor Jawa Barat seluas 3.371 m² senilai Rp.25.042.860.000,00.
- Tanah di Jl. Ampera Raya Cilandak Timur Jakarta Selatan seluas 979 m² senilai Rp.3.819.200.396,00.
- Tanah jalan khusus kompleks rumah negara seluas 690 m² senilai Rp.2.566.800.000,00.

Terdapat tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh ANRI yang belum terdapat bukti kepemilikan seluas 690 m² senilai Rp2.566.800.000,00 berupa tanah jalan khusus kompleks di rumah negara Jl. Ampera Raya I/II Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang masih dalam proses perolehan bukti kepemilikan sebagaimana Surat ANRI Nomor : PL.07/394/2013 tanggal 15 Maret 2013 hal Mohon penjelasan tertulis Atas Penggunaan Tanah Untuk Fasilitas Jalan dan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor:1024/7-31.74-300/8/2013 tanggal 17 Mei 2013 serta kuitansi pembayaran dalam rangka pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah tanggal 02 September 2013.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp 171.558.428.270,00 dan Rp 157.278.538.416,00. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin
Rp171.558.428.270

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2012	157.278.538.416
Mutasi tambah:	
- saldo awal	1.616.647.000
- pembelian	10.245.554.243
- transfer masuk	164.759.000
- penyelesaian pembangunan dengan KDP	472.189.100
- reklasifikasi masuk	2.297.600.000
- pengembangan nilai aset	307.697.000
Mutasi kurang:	
- transfer keluar	(164.759.000)
- penghentian aset dari penggunaan	(659.797.489)
Saldo per 31 Desember 2013	171.558.428.270
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	134.099.705.257
Nilai Buku per 31 Desember 2013	37.458.723.013

Transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 15.104.446.343,00 adalah berupa:

- Penambahan dari nilai saldo awal berasal dari pencatatan aset milik ANRI di Jl. Gajah Mada No.111 Jakarta Barat yang belum tercatat sebagai aset ANRI dan telah dilakukan penilaian atas aset tersebut oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V berdasarkan Surat Nomor: S-2292/WKN.07/KNL.05/2013 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp1.616.647.000,00.

Nilai saldo awal tersebut meliputi rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Intrakomptable	
		Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
3.05.01	Alat kantor	23	30.691.000
3.05.02	Alat rumah tangga	189	140.107.000
3.08.01	Unit alat laboratorium	1	681.000
3.09.01	Senjata api	5	1.444.800.000
3.17.01	Unit peralatan proses/produksi	2	368.000
Total			1.616.647.000

- Penambahan dari pembelian sebesar Rp 10.245.554.243,00.

Nilai Pembelian tersebut meliputi rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Intrakomptable	
		Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
3.02.01	Alat angkutan darat bermotor	6	1.897.962.000
3.02.02	Alat angkutan darat tak bermotor	7	14.000.000
3.03.03	Alat ukur	11	197.175.000
3.04.01	Alat pengolahan	1	8.300.000
3.05.01	Alat kantor	283	1.260.528.800
3.05.02	Alat rumah tangga	426	3.260.499.440
3.06.01	Alat studio	89	315.536.000
3.06.02	Alat komunikasi	20	214.382.002
3.06.03	Peralatan pemancar	3	192.150.000

3.08.01	Unit alat laboratorium	4	56.400.000
3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2	4.554.000
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	1	8.186.200
3.10.01	Komputer unit	83	1.158.880.800
3.10.02	Peralatan computer	139	1.481.440.000
3.15.04	Alat kerja penerbangan	7	163.010.001
3.17.01	Unit peralatan proses/produksi	2	12.550.000
Total		1.084	10.245.554.243

Pembelian peralatan dan mesin berasal dari :

- Belanja modal peralatan dan mesin Rp 7.612.835.200,00
- Belanja modal gedung dan bangunan Rp 1.505.266.040,00
- Belanja modal jaringan Rp 944.603.000,00
- Belanja modal fisik lainnya Rp194.850.000,00.

Terdapat **koreksi audit BPK** untuk peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat kedalam gedung dan bangunan sebesar Rp 1.497.866.040 (nilai tersebut sudah masuk kedalam kelompok belanja modal gedung dan bangunan Rp 1.505.266.040).

- c. Penambahan transfer masuk sebesar Rp164.759.000,00 berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat dari Satker ANRI Jakarta ke Satker Balai Arsip Tsunami Aceh.
- d. Penambahan dari penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp472.189.100,00 berupa pekerjaan fire alarm system Gd. C ANRI Jakarta melalui belanja modal jaringan.
- e. Penambahan dari reklasifikasi masuk sebesar Rp2.297.600.000,00 berupa reklasifikasi masuk AC central yang pada saat penyerahan barang ex BRR pencatatannya digabung dengan nilai gedung dan bangunan.
- f. Penambahan dari pengembangan nilai aset sebesar Rp307.697.000,00 berupa pekerjaan perbaikan AC central di Balai Arsip Tsunami Aceh dan perbaikan mesin leave casting dan hydrant pada satker ANRI Jakarta melalui belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp176.658.000,00; honor Pokja kegiatan reinstal ahu sebesar Rp14.867.000,00 dan pekerjaan perbaikan dehumidifier hasil koreksi audit BPK yang sebelumnya tercatat dalam kelompok gedung dan bangunan sebesar Rp39.600.000,00 melalui belanja gedung dan bangunan; pekerjaan konsultan pengawas dan perencana reinstal ahu di

satker ANRI Jakarta melalui belanja modal jaringan sebesar Rp76.572.000,00.

Sementara transaksi pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp 824.556.489,00 adalah berupa :

- a. Pengurangan dari transfer keluar sebesar Rp 164.759.000,00 berupa transfer kendaraan kendaraan roda empat dari Satker ANRI Jakarta ke Satker Balai Arsip Tsunami Aceh.
- b. Pengurangan dari reklasifikasi menjadi aset lain-lain sebesar Rp659.797.489,00 atau sebanyak 123 unit aset yang dihentikan dari penggunaan operasional yaitu berasal dari reklasifikasi peralatan kantor.

Dari jumlah/nilai peralatan dan mesin di atas, jumlah peralatan dan mesin yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 17 Unit dengan nilai sebesar Rp.6.140.969.923,- (*enam milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*). Nilai penghapusan/ pemindahtanganan telah diusulkan ke Pengelola Barang untuk dilakukan transfer ke Universitas Diponegoro dan hibah ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kepulauan Riau, dan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp188.514.743.536

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp188.514.743.536,00 dan Rp175.871.756.557,00.

Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp175.871.756.557,00
Mutasi tambah:	
- pengembangan melalui nilai aset	Rp1.101.100.469,00
- pengembangan melalui KDP	Rp13.839.486.510,00
Mutasi kurang:	
- koreksi pencatatan nilai/kuantitas	(Rp2.297.600.000,00)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp188.514.743.536,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	Rp62.691.405.548,00
Nilai buku per 31 Desember 2013	Rp125.823.337.988,00

Transaksi penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp14.940.586.979,00 berasal dari :

- a. Pengembangan nilai aset sebesar Rp1.101.100.469,00 berupa pekerjaan renovasi Gd. B kelas utama Pusdiklat, Gd. A Pusdiklat, Basement Gd. C ANRI Jakarta, Basement Gd. A ANRI Jakarta, Toilet Gd. A Diorama, dan renovasi ruang dry chamber serta gedung Balai Arsip Tsunami Aceh melalui belanja modal gedung dan bangunan, dan koreksi audit BPK sebesar Rp 81.400.000,00 yang berasal dari belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi.
- b. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp 13.839.486.510,00 berupa pekerjaan pelapisan dinding luar Gd. E dan Gd. G, rehabilitasi kantor pusdiklat, rehabilitasi asrama I Pusdiklat, Gd. Record centre, basement Gd.F, sarana prasarana Gd.P, dan renovasi Gd. C laboratorium Pusdiklat ANRI.

Sementara transaksi pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp2.297.600.000,00 berasal dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas yang merupakan nilai AC central yang pada saat penyerahan barang ex BRR pencatatannya digabung dengan nilai gedung dan bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 16.240.117.839,00 dan Rp13.419.676.529,00. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.820.441.310,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	13.419.676.529
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	580.000
Pembelian	698.751.110
Pengembangan Melalui KDP	556.352.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.564.758.200
Saldo per 31 Desember 2013	16.240.117.839
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(4.348.745.367)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	11.891.372.472

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp16.240.117.839

Transaksi penambahan jalan, irigasi dan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Irigasi berasal dari pembelian berupa pembuatan sumur sampit gedung P ANRI Jakarta senilai Rp170.566.000,00.
- b. Jaringan berasal dari saldo awal berupa instalasi gardu listrik Gajah Mada yang belum dicatat kedalam SIMAK-BMN, namun BMN tersebut sudah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai KPKNL senilai Rp580.000,00.
- c. Jaringan berasal dari pembelian berupa penangkal petir, AC gedung P, fiber optic dan jaringan telepon ANRI Jakarta senilai Rp528.185.110,00.
- d. Jaringan berasal dari pengembangan melalui KDP berupa panel listrik penerangan gedung F ANRI Jakarta senilai Rp556.352.000,00.
- e. Jaringan berasal dari penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa panel listrik gedung C ANRI Jakarta senilai Rp1.564.758.200,00.

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran 1A Laporan Keuangan ini.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp7.924.247.888

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp7.924.247.888,00 dan Rp7.815.257.888,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya berasal dari pengadaan senilai Rp108.990.000,00 termasuk didalamnya pembelian berupa buku sebesar Rp65.990.000,00 dan pembuatan video dokumenter PKB sebesar Rp43.000.000,00.

Saldo per 31 Desember 2012	7.815.257.888
Mutasi tambah:	
Pembelian	108.990.000
Saldo per 31 Desember 2013	7.924.247.888
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	(27.313.663)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	7.896.934.225

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Ganti Rugi
Rp 0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp1.976.188,00 . Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang tak
Tertagih - Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp9.881,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp14.565.599.145

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp14.565.599.145,00 dan Rp12.947.021.524,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan/Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	Rp 14.565.599.145	Rp 12.659.577.325	Rp 1.906.021.820
2	Aset Lain-Lain	Rp 287.444.199	Rp 287.444.199	Rp -
	Nilai Perolehan	Rp 14.853.043.344	Rp 12.947.021.524	Rp 1.906.021.820
	Akumulasi Penyusutan	Rp 287.444.199	Rp -	Rp 287.444.199
	Nilai Buku	Rp 14.565.599.145	Rp 12.947.021.524	Rp 2.193.466.019

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp14.565.599.145

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp14.565.599.145,00 dan Rp12.659.577.325,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset

Tak Berwujud pada lingkup ANRI berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Aset tak Berwujud per Satker

(dalam Rupiah)

No.	Satker	TA 2013	TA 2012
1	ANRI Jakarta	Rp 14.565.599.145	Rp 12.659.577.325
Jumlah		Rp 14.565.599.145	Rp 12.659.577.325

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	12.659.577.325
Mutasi tambah:	
- pembelian paket aplikasi	394.427.500
- pengembangan nilai aset	1.511.594.320
Saldo per 31 Desember 2013	14.565.599.145

Terdapat mutasi tambah untuk aset tidak berwujud sebesar Rp 1.906.021.820,00 berasal dari pembelian software anti virus dan software original serta aset tak berwujud berupa aplikasi pengolahan data arsip, sistem barcode, aplikasi layanan diorama, aplikasi arsip perbatasan negara, aplikasi pameran berbasis windows dan aplikasi peminjaman arsip statis senilai Rp394.427.500,00 serta pengembangan nilai aset berupa pengembangan aplikasi kepegawaian, aplikasi tata naskah dinas, digitalisasi arsip dan digitalisasi buku antiquarant senilai Rp1.511.594.320,00.

C.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp287.444.199

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah senilai Rp 287.444.199,00 dan Rp 287.444.199,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2012	287.444.199
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	659.797.489
Mutasi kurang:	
- penghapusan	659.797.489
Nilai Buku per 31 Desember 2013	287.444.199

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi penambahan sebesar Rp659.797.489,00 merupakan hasil reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya akibat rusak berat berupa alat kantor, alat rumah tangga dan komputer unit;
- Mutasi pengurangan sebesar Rp659.797.489,00 merupakan penghapusan aset tetap berupa alat kantor, alat rumah tangga dan komputer unit.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp2.024.031.000,00 dan Rp2.375.151.749,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 2.023.912.700	Rp 2.020.211.749
Uang Muka dari KPPN	Rp 118.300	Rp 11.940.000
Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp -	Rp 343.000.000
Jumlah	Rp 2.024.031.000	Rp 2.375.151.749

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp2.023.912.700

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 2.023.912.700,00 dan Rp 2.020.211.749,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

1	Belanja pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp8.568.280	Pembayaran kekurangan gaji atas kenaikan gaji berkala pegawai ANRI bulan Desember 2013
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp480.930.020	Pembayaran tagihan listrik dan telepon kantor ANRI Jakarta, Pusdiklat Kearsipan Bogor, tagihan PDAM kantor Pusdiklat Kearsipan Bogor pemakaian bulan Desember 2013
3	Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp1.534.414.400	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak (tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember 2013)
Total		Rp2.023.912.700	

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp118.300

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 118.300,00 dan Rp 11.940.000,00 . Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Uang Muka dari KPPN sebesar Rp 11.618.300,00 tersebut berasal dari dana UP/TUP yang belum di pertanggungjawabkan/GU-Nihilkan yang berasal dari Satker BPAD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 118.300,00 yang telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 5 Januari 2014 dengan NTPN 0610120001050400.

C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp0

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 343.000.000,00. Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2013.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar
Rp 198.925.823

C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana

Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Cadangan Piutang	Rp 1.966.307	Rp 224.984.246
2	Cadangan Persediaan	Rp 288.606.170	Rp 670.406.839
3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek	Rp (489.498.300)	Rp (338.456.749)
	Jumlah	Rp (198.925.823)	Rp 556.934.336

C.6.1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp1.966.307

Nilai Cadangan Piutang tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.966.307,00 dan Rp 224.984.246,00. Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

C.6.2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan
Rp288.606.170

Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 288.606.170,00 dan Rp 670.406.839,00. Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Rp489.498.300

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 489.498.300,00 dan Rp338.456.749,00. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.7 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi
Rp413.190.827.239

Ekuitas Dana Invesatasi merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 33.

Tabel 33
Rincian Ekuitas Dana Investasi

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012
1	Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp 398.625.228.094	Rp 569.940.089.786
2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	Rp 14.565.599.145	Rp 12.948.987.831
	Jumlah	Rp 413.190.827.239	Rp 582.889.077.617

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam
Aset Tetap
Rp398.625.228.094

Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp 398.625.228.094,00 dan Rp569.940.089.786,00. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya
Rp14.565.599.145

Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 14.565.599.145,00 dan Rp12.948.987.831,00. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sebagaimana Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 218/HP/XVI/12/2013 tanggal 23 Desember 2013, terdapat 51 (lima puluh satu) temuan dengan 83 (delapan puluh tiga) rekomendasi yang terdiri atas 73 (tujuh puluh tiga) rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti senilai Rp 1.752.447.069,71 dan terdapat 9 (sembilan) rekomendasi yang belum sesuai ditindaklanjuti, serta 1 (satu) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Tindak Lanjut LHP BPK pada ANRI meliputi :

- a. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2004 dengan Nomor LHP 18/XIII/09/2005 tanggal 5 September 2005. LHP tersebut mengungkapkan dua temuan dengan tiga rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;

- b. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2005 dengan Nomor LHP 25/HP/XIII/06/2006 tanggal 19 Juni 2006. LHP tersebut mengungkapkan dua temuan dengan dua rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- c. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2006 dengan Nomor LHP 40/HP/XIII/06/2007 tanggal 27 Juni 2007. LHP tersebut mengungkapkan dua temuan dengan tiga rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- d. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2007 dengan Nomor LHP 34/HP/XIII/04/2008 tanggal 30 April 2008. LHP tersebut mengungkapkan lima temuan dengan tujuh rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak lima;
 - 2) Tindak lanjut yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak satu;
 - 3) Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak satu.
- e. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2008 dengan Nomor LHP 46/HP/XIII/04/2009 tanggal 30 April 2009. LHP tersebut mengungkapkan empat temuan dengan lima rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- f. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan Nomor LHP 61/HP/XIII/05/2010 tanggal 20 Mei 2010. LHP tersebut mengungkapkan tujuh temuan dengan sembilan rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi;
- g. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2010 dengan Nomor LHP 99/HP/XIII/05/2011 tanggal 20 Mei 2011. LHP tersebut mengungkapkan delapan temuan dengan 12 rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;

- h. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dengan Nomor LHP 27/HP/XVI/05/2012 tanggal 14 Mei 2012. LHP tersebut mengungkapkan delapan temuan dengan 11 rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak sepuluh;
 - 2) Tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak satu.
- i. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan Nomor LHP 78/HP/XIII/05/2013 tanggal 24 Mei 2013. LHP tersebut mengungkapkan delapan temuan dengan 31 rekomendasi. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak dua puluh empat;
 - 2) Tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak tujuh.

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan ANRI sampai dengan Semester II Tahun 2013 sebagaimana dalam Lampiran A3.

ANRI telah melaporkan tindak lanjut penyelesaian atas Hasil Pemantauan TLHP BPK sampai dengan Oktober 2013 melalui surat Nomor PW.06.02/1888/2013 tanggal 28 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PAN, BPKP, BKN, LAN dan ANRI Tahun 2005 No. 25/HP/XII/06/2006 tanggal 19 Juni 2006 dan Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2007 No.34/HP/XVI/04/2008 tanggal 30 April 2008 yaitu pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Rekomendasi BPK:

- a. Kepala ANRI agar melakukan negosiasi kembali dengan pihak Yayasan Gedung Arsip Nasional RI sebagai penyewa/pengelola aset negara di Jl. Gajah Mada dengan memperhitungkan kewajiban yayasan dalam memberikan kontribusi kepada negara sejak November 1998 sampai dengan tahun 2006, apabila dalam negosiasi tidak diperoleh kesepakatan agar kepala ANRI mengambil alih kembali hak pengelola aset negara di Jalan Gajah Mada No.111 dengan cara musyawarah dan mufakat atau menempuh jalur

hukum.

- b. Kepala ANRI agar menarik kembali aset ANRI yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga tanpa ada kontribusi ke Negara.
- c. Kepala ANRI agar segera membuat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan Gedung ANRI dengan pihak Yayasan Gedung ANRI sebagai penyewa/pengelola dengan memperhitungkan kewajiban yayasan dalam memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk PNBP.

Tindak Lanjut ANRI :

- 1) ANRI menerima tembusan Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-1089/KN/2013 kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 September 2013 Perihal Aset Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jalan Gajah Mada No.111 Jakarta yang memerintahkan agar ANRI segera melakukan serah terima Gedung ANRI Jl. Gajah Mada No.111 Jakarta Barat, sehingga tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik.
 - 2) ANRI telah mengirimkan surat kepada Likuidator Yayasan Gedung ANRI Nomor PL.07/1792/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Hal Serah Terima Gedung Arsip Nasional RI Jl. Gajah Mada No.111 Jakarta Barat, dalam surat tersebut ANRI bermaksud untuk melakukan serah terima Gedung ANRI Jl. Gajah Mada No.111 Jakarta Barat pada akhir bulan Oktober 2013.
2. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2007 No. 34/HP/XVI/08/2008 tanggal 30 April 2008, yaitu pada Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi BPK:

Kepala ANRI agar segera memprioritaskan pengurusan Sertifikat Tanah dan mengajukan anggaran untuk biaya persertifikatan atas tanah tersebut.

Tindak Lanjut ANRI:

ANRI telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor PL.07/1693/2013 tanggal 1 Oktober 2013 hal permohonan pengukuran tanah untuk fasilitas jalan umum pada kompleks rumah dinas ANRI.

ANRI telah mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dilakukan survei, pengukuran dan pemetaan tanggal 2 September 2013.

Kepala Biro Umum ANRI menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2069/3-31,74-200/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 perihal pemberitahuan mengenai jadwal pengukuran.

3. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2011 Nomor: 27C/HP/XVI/05/2012 tanggal 14 Mei 2012, yaitu pada Sistem Pengendalian Intern.

Rekomendasi BPK:

- 1) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Pusat Jasa untuk mengikuti mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Merevisi kembali PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang PNBPN ANRI.

Tindak Lanjut ANRI :

ANRI telah menerima undangan rapat dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor Und-314/AG/2013 tanggal 26 Juni 2013 Hal Undangan Rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan acara klarifikasi dan finalisasi konsepsi Rancangan PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di ANRI.

Rekomendasi BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Kepala ANRI agar merevisi kembali PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang PNBPN ANRI.
- 2) Memerintahkan Sekretaris Utama ANRI segera memproses pinjam pakai BMN sesuai pengelolaan BMN.

Tindak Lanjut ANRI :

ANRI telah menerima undangan rapat dari Plt. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor Und-314/AG/2013 tanggal 26 Juni 2013 Hal Undangan Rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan acara klarifikasi dan finalisasi konsepsi Rancangan PP Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di ANRI.

Sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013, ANRI belum menerima jawaban surat dari Kepala Kantor Wilayah VII DJKN Kementerian Keuangan atas surat Nomor PL.07/974/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan

surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas surat Nomor PL.07/973/2013 tanggal 13 Mei 2013.

4. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2012 Nomor: 78/HP/XVI/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, yaitu pada Sistem Pengendalian Intern.

Rekomendasi BPK:

- 1) Kepala ANRI agar memperingatkan kasir Jasa Penyelenggaraan Diklat dan kasir Jasa Penggandaan dan Alih Media untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- 2) Membuat aturan terkait mekanisme dan batas waktu penyetoran uang dari kasir kepada bendahara penerima.
- 3) Memperingatkan Kepala Pusdiklat Kearsipan dan Direktur Pemanfaatan untuk mengendalikan dan mengawasi secara intensif petugas pengelola anggaran.
- 4) Kepala ANRI agar memperingatkan Kepala Biro Perencanaan agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun anggaran sesuai dengan peraturan tentang klasifikasi belanja.
- 5) Kepala ANRI agar mengingatkan Kepala Biro Perencanaan agar lebih cermat dalam penyusunan RKA-K/L khususnya terkait dengan dana dekonsentrasi.
- 6) Kepala ANRI agar memerintahkan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan pengamanan dan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut ANRI :

- 1) Sekretaris ANRI telah memerintahkan kasir Jasa Penyelenggaraan Diklat dan kasir Jasa Penggandaan dan Alih Media untuk melakukan pembukuan atas PNBP Jasa Penyelenggaraan Diklat dan kasir Jasa Penggandaan dan Alih Media sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
- 2) Sekretaris Utama ANRI telah memerintahkan Kepala Pusdiklat Kearsipan dan Direktur Pemanfaatan untuk mengendalikan dan mengawasi secara intensif PNBP Jasa Penyelenggaraan Diklat dan kasir Jasa Penggandaan dan Alih Media yang diterima dan disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku

sesuai Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.

- 3) Sekretaris Utama ANRI telah memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk bekerja lebih cermat dan teliti dalam menyusun anggaran sesuai dengan peraturan tentang klasifikasi belanja sesuai Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
 - 4) Sekretaris Utama ANRI telah memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk bekerja lebih cermat dan teliti dalam penyusunan RKA-K/L khususnya terkait dengan dana dekonsentrasi sesuai Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
 - 5) Sekretaris Utama ANRI telah memerintahkan Kepala Biro Umum untuk melaksanakan pengamanan dan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku sesuai Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
5. Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2012 Nomor: 78/HP/XVI/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, yaitu pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi BPK:

- 1) Kepala ANRI agar mempercepat proses revisi PP No.42 Tahun 2005 tentang Tarif dan Jenis PNBPN di Lingkungan ANRI.
- 2) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Pusdiklat Kearsipan Bogor untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam hal ketertiban pengelolaan PNBPN dan penatausahaan kas di Bendahara Penerimaan.
- 3) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Jasa dan Bendahara Penerima ANRI untuk melaksanakan pembukuan pengawasan anggaran untuk memonitor pelaksanaan perjanjian kerjasama terkait pengelolaan PNBPN.
- 4) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Pusat Jasa untuk melakukan addendum PKS Tahun 2013 dan mengenakan tarif PNBPN sesuai ketentuan.

- 5) Kepala ANRI agar memperingatkan Kepala Pusat Jasa yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan PNBP.
- 6) Kepala ANRI agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan Pengelolaan PNBP Pusat Jasa.
- 7) Kepala ANRI agar menetapkan SK Penunjukan Pelaksana pemungutan PNBP Jasa Sewa Gedung ANRI Jalan Gajah Mada.
- 8) Kepala ANRI agar menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur tentang mekanisme penerimaan PNBP atas jasa sewa gedung ANRI Jalan Gajah Mada.
- 9) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PNBP Jasa Sewa Gedung ANRI Jalan Gajah Mada.
- 16) Kepala ANRI agar memperingatkan Pelaksana Pembuat Daftar Gaji (PDG) yang tidak cermat dalam melakukan perhitungan uang makan.
- 17) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Kepegawaian untuk melakukan koordinasi pembuatan sistem yang terintegrasi antara aplikasi gaji pokok pegawai di Bagian Keuangan dengan aplikasi presensi pegawai di Bagian Kepegawaian dan melakukan rekonsiliasi setiap bulan.
- 18) Kepala ANRI agar memperingatkan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Verifikator yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya.
- 19) Kepala ANRI agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- 20) Kepala ANRI agar memperingatkan Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan PPK yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
- 21) Kepala ANRI agar menyusun dan menetapkan standar baku tentang komponen beban kerja yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan jasa penyimpanan arsip;
- 22) Kepala ANRI agar memperingatkan Kepala Pusat Jasa Kearsipan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya;
- 23) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk lebih cermat dalam pelaksanaan penyusunan program dan anggaran terkait PNBP Fungsional;

- 24) Kepala ANRI agar memerintahkan Sekretaris Utama selaku KPA untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan belanja yang bersumber dari PNBP.
- 25) Kepala ANRI agar memerintahkan Petugas SAI dan atasan langsung petugas SAI untuk lebih cermat dalam mencatat dan melaporkan piutang.
- 26) Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk mengurus izin penggunaan Gedung I untuk Kopanri dan membuat perjanjian kerja sama atas penggunaan BMN ANRI oleh Kopanri.
- 27) Kepala ANRI agar memerintahkan Kuasa Pengguna Barang c.q. Kepala Biro Umum agar lebih cermat dalam memahami ketentuan mengenai pemanfaatan barang milik negara.

Tindak Lanjut ANRI :

- 1) ANRI telah mengusulkan revisi PP No.42 Tahun 2005 tentang Tarif dan Jenis PNBP di Lingkungan ANRI.
- 2) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Pusdiklat Kearsipan Bogor untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP Jasa Penyelenggaraan Diklat sesuai peraturan berlaku sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
- 3) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Jasa dan Bendahara Penerima ANRI untuk melaksanakan pembukuan pengawasan anggaran untuk memonitor pelaksanaan perjanjian kerjasama terkait pengelolaan PNBP Pendapatan Jasa Lainnya sesuai peraturan berlaku sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
- 4) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Pusat Jasa untuk melakukan addendum PKS Tahu 2013 dan mengenakan tarif PNBP Pendapatan Jasa Lainnya sesuai dengan ketentuan, berdasarkan Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
- 5) Kepala ANRI telah memperingatkan Kepala Pusat Jasa Kearsipan melaksanakan tugas pengelolaan PNBP Pendapatan Jasa Lainnya sesuai dengan ketentuan dan mentaati seluruh peraturan yang berlaku sesuai dengan Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan

- Pemeriksaan BPK-RI.
- 6) Sekretaris Utama ANRI telah memperingatkan kepada Kepala Pusat Jasa Kearsipan untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Memorandum Nomor: PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
 - 7) Kepala ANRI telah menetapkan Keputusan Kepala ANRI Nomor HK.01.02/69/2013 tentang Pengangkatan Bendahara Penerima Pembantu/Kasir pada Direktorat Pemanfaatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Gedung Gajah Mada ANRI Tahun Anggaran 2013.
 - 8) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Biro Umum untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PNBPN Jasa Sewa Gedung ANRI Jalan Gajah Mada ANRI sesuai peraturan berlaku sesuai Instruksi Kepala ANRI Nomor:1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
 - 9) Sekretaris Utama ANRI telah memerintahkan Pembuat Daftar Gaji (PDG) untuk lebih cermat dalam melakukan perhitungan uang makan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
 - 10) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Kepegawaian untuk melakukan koordinasi pembuatan sistem yang terintegrasi antara aplikasi gaji pokok pegawai di Bagian Keuangan dengan aplikasi presensi pegawai sesuai peraturan berlaku sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
 - 11) Kepala ANRI telah memperingatkan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Petugas Verifikator untuk lebih cermat dalam memverifikasi pembayaran belanja perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.

- 12) Kepala ANRI telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Belanja Modal untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai peraturan berlaku sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
- 13) Sekretaris Utama ANRI telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan PPK Belanja Barang dan Belanja Modal untuk lebih cermat dan teliti dalam menerima dan memeriksa pekerjaan serta penyelesaian pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku sesuai Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
- 14) Kepala ANRI telah membuat draft peraturan Kepala ANRI tentang Petunjuk Teknis Analisa Beban Kerja Pelaksana Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip di Lingkungan Pusat Jasa Kearsipan ANRI.
- 15) Kepala ANRI telah memperingatkan Kepala Pusat Jasa Kearsipan untuk bekerja lebih baik dengan menggunakan anggaran PNBP sesuai tujuan dan ketentuan sesuai Memorandum No. PW.06.02/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Hal Peringatan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.
- 16) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk lebih cermat dalam pelaksanaan penyusunan program dan anggaran terkait PNBP Fungsional sesuai ketentuan sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
- 17) Kepala ANRI telah memerintahkan Sekretaris Utama selaku KPA untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan belanja yang bersumber dari PNBP sesuai ketentuan sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
- 18) Kepala ANRI telah memerintahkan Atasan Langsung SAI dan Petugas SAI untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan pencatatan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian atas piutang sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.

- 19) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Biro Umum untuk mengurus ijin penggunaan Gedung I dan membuat perjanjian kerja sama atas penggunaan BMN ANRI dengan Kopanri sesuai peraturan berlaku sesuai ketentuan sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.
- 20) Kepala ANRI telah memerintahkan Kepala Biro umum untuk lebih cermat dalam memahami ketentuan mengenai pemanfaatan barang milik negara sesuai Instruksi Kepala ANRI No.1 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Hasil Pemeriksaan atas LK ANRI Tahun 2012.

Matriks Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Atas Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Oktober 2013 pada ANRI sebagaimana dalam Lampiran A4.

D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan, pendapatan dan belanja akrual pada Arsip Nasional Republik Indonesia TA. 2013 diantaranya sebagai berikut:

A. Tingkat Satuan Kerja

1. Pendapatan Akrual

Pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (450448) per 31 Desember 2013 tidak terdapat pendapatan akrual.

2. Belanja Akrual

Pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (450448) terdapat belanja belanja gaji pokok PNS (511111) sebesar Rp7.598.600,00; belanja pembulatan gaji PNS (511119) sebesar Rp 1.056,00; belanja tunjangan suami/istri PNS (511121) sebesar Rp 475.480,00; belanja tunjangan anak PNS (511122) sebesar Rp104.150,00; belanja tunjangan PPh PNS (51125) sebesar Rp388.994,00; belanja langganan listrik (522111) sebesar Rp468.501.150,00; belanja langganan telepon (522112) sebesar Rp 8.966.770,00; belanja langganan air (522113) sebesar Rp 3.462.100,00

sehingga jumlah belanja akrual Tahun 2013 berupa : belanja gaji pokok PNS sebesar Rp18.502.103.920,00; belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp 465.920,00; belanja tunjangan suami/istri PNS sebesar Rp 1.296.981.680,00; belanja tunjangan anak PNS sebesar Rp366.675.700,00; belanja tunjangan PPh PNS sebesar Rp634.142.147,00;belanja langganan listrik sebesar Rp 5.650.056.929,00; belanja langganan telepon sebesar Rp 175.097.942,00; belanja langganan air sebesar Rp 34.193.640,00.

Dengan demikian belanja yang masih harus dibayar terdiri atas : belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 8.568.280,00; belanja jasa sebesar Rp 480.930.020,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp 489.498.300,00 disajikan sebagai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek pada Neraca.

B. Tingkat Kementerian/Lembaga

1. Pendapatan Akrual

Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (087) per 31 Desember 2013 tidak terdapat pendapatan akrual.

2. Belanja Akrual

Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (087) masih terdapat belanja gaji pokok PNS (511111) sebesar Rp7.598.600,00; belanja pembulatan gaji PNS (511119) sebesar Rp 1.056,00; belanja tunjangan suami/istri PNS (511121) sebesar Rp 475.480,00; belanja tunjangan anak PNS (511122) sebesar Rp104.150,00; belanja tunjangan PPh PNS (51125) sebesar Rp388.994,00; belanja langganan listrik (522111) sebesar Rp468.501.150,00; belanja langganan telepon (522112) sebesar Rp 8.966.770,00; belanja langganan air (522113) sebesar Rp 3.462.100,00 sehingga jumlah belanja akrual Tahun 2013 berupa : belanja gaji pokok PNS sebesar Rp18.502.103.920,00; belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp 465.920,00; belanja tunjangan suami/istri PNS sebesar Rp 1.296.981.680,00; belanja tunjangan anak PNS sebesar Rp366.675.700,00; belanja tunjangan PPh PNS sebesar Rp634.142.147,00;belanja langganan listrik sebesar Rp 5.650.056.929,00; belanja langganan telepon sebesar Rp 175.097.942,00; belanja langganan air sebesar Rp 34.193.640,00.

Dengan demikian belanja yang masih harus dibayar terdiri atas : belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 8.568.280,00; belanja jasa sebesar Rp 480.930.020,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp 489.498.300,00 disajikan sebagai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek pada Neraca.

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam Lampiran A2.

D.3 REKENING PEMERINTAH

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara dan Lembaga, ANRI telah melakukan pendataan rekening sampai dengan 31 Desember 2013. Adapun rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional ANRI sebagaimana terlampir dalam Lampiran A5.

D.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sampai dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 ini disusun, ANRI tidak memiliki Badan Layanan Umum (BLU).

Arsip/Dokumen Negara yang ada pada ANRI merupakan Aset Bersejarah (*Heritage Assets*), dimana arsip yang dimaksud kiranya sulit dinilai dengan uang karena hakekatnya arsip memiliki nilai budaya, merupakan bahan pertanggungjawaban nasional, bukti sejarah, warisan budaya bangsa, bukti akuntabilitas, bukti sah di pengadilan, warisan nasional dan sebagai simpul pemersatu bangsa demi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Adapun Khasanah Arsip/Dokumen Negara yang ada di ANRI dimaksud yang memiliki nilai guna sejarah pada Tahun Anggaran 2013 dan 2012 disajikan pada tabel 34.

Tabel 34
Rincian Khasanah Arsip

JENIS	2013		2012		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
Arsip Tekstual/Kertas	29.540	Meter Linier	29.120	Meter Linier	420	1,44
Arsip Kartografik/Peta	100.370	Lembar	97.425	Lembar	2.945	3,02
Arsip Film	59.109	Reel	55.869	Reel	3.240	5,80
Arsip Mikrofilm Negatif	9.932	Roll	9.932	Roll	-	-
Arsip Mikrofilm Positif	4.732	Roll	4.732	Roll	-	-
Arsip Mikrofische	7.200	Fische	7.200	Fische	-	-
Arsip Rekaman Suara	43.276	Kaset	43.276	Kaset	-	-
Reel to reel sound	871	Reel	871	Reel	-	-
Arsip Video	27.350	Kaset	27.350	Kaset	-	-
Arsip Foto (Negatif dan Prints)	1.663.000	Lembar	1.663.000	Lembar	-	-
Arsip Optical Disc	3.336	Keping	2.120	Keping	1.216	57,36
JUMLAH	1.948.716		1.940.895		7.821	0,40

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: HK.01.02/69.D/2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor HK.01.02/153/2012 tentang Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satker ANRI Jakarta sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Gina Masudah. H
- b. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Syaifuddin
- c. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretaris Utama : Kahim Sundjaja
- d. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang
Pembinaan Kearsipan : Abdul Haris M. Ali
- e. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang
Konservasi Arsip : Retno Wulandari
- f. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang
IPSK : Rini Agustiani
- g. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat
Pendidikan & Pelatihan : Sulistyowati

- h. Pejabat Pembuat Komitmen Belanja
 - Gaji dan Tunjangan Pegawai : Widenta. S
- i. Atasan Langsung Bendahara
 - Penerimaan : Ali Sugeng
- j. Bendahara Pengeluaran : Dewi Santi. A
- k. Bendahara Penerima : Erma Sulistoningsih

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KP.07/03/2013, Nomor HK.01.02/08/2013, Pejabat Pengelola/Pelaksana Anggaran pada Balai Tsunami Aceh Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Gina Masudah. H
- b. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Sarip Hidayat
- c. Pejabat Pembuat Komitmen : Rusnardjo
- d. Bendahara Pengeluaran : Lisa Novianty

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2013 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor: DIPA-087.01-1/2013 tanggal 25 April 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp175.218.580.000,00 diturunkan menjadi :

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor:DIPA-087.01.1.450448/2013 tanggal 05 Desember 2012 untuk Satker Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta dengan pagu anggaran sebesar Rp145.880.812.000,00
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor:DIPA-087.01.1.681464/2013 tanggal 05 Desember 2012 untuk Satker Balai Arsip Tsunami Aceh dengan pagu anggaran sebesar Rp2.700.000.000,00
- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 untuk 33 (tiga puluh tiga) Satker Badan/Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah Provinsi dengan total pagu anggaran sebesar Rp5.600.000.000,00.

Untuk DIPA Petikan ANRI Jakarta TA 2013 Nomor: DIPA-087.01.1.450448/2013 tanggal 05 Desember 2012 telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu:

- a. Revisi ke-1 tanggal 19 Maret 2013;
- b. Revisi ke-2 tanggal 5 April 2013;
- c. Revisi ke-3 tanggal 1 Mei 2013;

- d. Revisi ke-4 tanggal 10 Juni 2013;
- e. Revisi ke-5 tanggal 20 Juni 2013;
- f. Revisi ke-6 tanggal 30 Juli 2013;
- g. Revisi ke-7 tanggal 9 Oktober 2013.

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor: HK.01.02/49.A/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan atas keputusan Kepala ANRI Nomor: HK.01.02/08/2013 Tentang Tim Pelaksana/Pengelola APBN pada Balai Arsip Tsunami Aceh Tahun Anggaran 2013, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Arsip Tsunami Aceh maka pada tanggal 27 Maret 2013 telah dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen,

Semula : Sriyanah

Menjadi : Rosnarjo.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Balai Arsip Tsunami Aceh telah mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 tanggal 19 Maret 2013;
- b. Revisi ke-2 tanggal 29 April 2013.

Sesuai Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor S-305/D2/04/2013 tanggal 29 Mei 2013 hal PNBPN terutang oleh Yayasan Gedung ANRI dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1089/KN/2013 tanggal 19 Oktober 2013 hal Aset Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jalan Gajah Mada No.111 Jakarta, maka saldo akhir kewajiban Yayasan Gedung ANRI ke negara menjadi Nihil.

Telah dilakukan serah terima Aset Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia Jalan Gajah Mada Nomor 111 Jakarta Barat tertanggal 23 Desember 2013 antara pihak ANRI dengan Yayasan Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Aset sebagaimana dalam lampiran I Berita Acara Serah Terima Aset (termasuk aset yang akan diserahterimakan oleh Yayasan GANRI kepada Museum Tekstil dan Museum Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) belum dicatat dalam Neraca ANRI Tahun 2013 sebagai aset karena masih dalam proses pengesahan hibah barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

Adapun proses pengesahan hibah yang dilakukan ANRI melalui pengajuan surat permohonan permintaan nomor register hibah Nomor B-KU.02/383/2014 tanggal 12 Maret 2014 ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan RI yang ditindaklanjuti dengan penerbitan nomor register hibah untuk Arsip Nasional RI oleh DJPU melalui surat Nomor S-619/PU.6/2014 tanggal 14 Maret 2014 senilai Rp.1.931.127.010,- dengan nomor register 74913301.

Selanjutnya ANRI mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Tanggal 20 Maret 2014 Nomor 02 ke DJPU dan mendapatkan pengesahan melalui surat Nomor S-696/PU.6/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor SP3HLBJS-0762/PU.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013 senilai Rp.1.931.127.010,-.

Proses pengesahan hibah diakhiri dengan penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dimana sampai waktu berakhirnya pemeriksaan BPK-RI proses hibah langsung barang tersebut belum dapat diselesaikan tepat waktu mengingat batas waktu persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN paling lambat tanggal 28 Maret 2014.

Proses pengesahan hibah langsung barang belum dapat diselesaikan sampai ditandatanganinya Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan ANRI (BA087) Tahun 2013 Yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) Nomor NK.018/PB.6.4/2014 tanggal 16 April 2014.

Dengan demikian nilai hibah langsung barang senilai Rp.1.931.127.010,- belum dimasukkan dalam Laporan Keuangan ANRI Tahun 2013 (Audited).

Selanjutnya setelah dilakukan peninjauan atas nilai tersebut terdapat unsur barang yang diserahkan ke Museum Tekstil sebesar Rp.165.920.000,00 dan barang yang diserahkan ke Museum Nasional sebesar Rp.33.968.000,00 sedangkan barang yang diserahkan ke pihak ANRI hanya senilai Rp.1.731.239.010,00.

ANRI telah bersurat kepada Direktorat PKNSI perihal persetujuan nilai yang tertera dalam BAST Aset Gedung ANRI Jl. Gajah Mada melalui surat nomor B-PL.07/533/2014 Tanggal 10 April 2014 (sampai tanggal laporan ini dibuat, jawaban surat tersebut belum diterima).

Terdapat belanja barang pemeliharaan (5231) yang memenuhi nilai kapitalisasi kedalam aset tetap yang belum dicatat pada Neraca ANRI Tahun 2013 sebesar Rp64.300.000,00. Nilai tersebut berasal dari transaksi SPM Nomor 02730 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp52.800.000,00 dan SPM Nomor 01285 tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp11.500.000,00.

Dalam rangka pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Nilai Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-52/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada 20 (Dua Puluh) Kementerian Negara/Lembaga, ANRI telah melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja per 31 Desember 2013 sebesar Rp19.458.246.822,00 (bersih) setelah dikurangi pengembalian belanja tunjangan sebesar Rp521.511.928,00. Terdapat pengembalian belanja tunjangan kinerja bulan Desember 2013 yang disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 1400000908000808 tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp40.654.563,00. Dengan demikian realisasi bersih belanja tunjangan kinerja sebesar Rp19.417.592.259,00 dari pagu belanja sebesar Rp21.037.768.000,00.

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	118,300	
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,534,414,400	
0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Peberndaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,976,188	
0	115612	Piutang dari KPPN	21,749,096,709	
0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan		9,881
0	117111	Barang Konsumsi	257,991,715	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	18,756,200	
0	117131	Bahan Baku	2,295,000	
0	117199	Persediaan Lainnya	9,563,255	
0	131111	Tanah	215,554,860,396	
0	132111	Peralatan dan Mesin	171,558,428,270	
0	133111	Gedung dan Bangunan	188,514,743,536	
0	134111	Jalan dan Jembatan	4,849,774,764	
0	134112	Irigasi	505,163,400	
0	134113	Jaringan	10,885,179,675	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,924,247,888	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		134,099,705,257
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		62,691,405,548
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		716,698,524
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		113,697,919
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		3,518,348,924
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		27,313,663
0	162151	Software	800,195,000	
0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	13,765,404,145	
0	166111	Aset Lain-lain	356,339,759	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		68,895,560
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi		287,444,199
0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		19,513,055
0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		480,930,020
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		1,523,469,625
0	219511	Uang Muka dari KPPN		118,300
0	219711	Utang Kepada KUN	835,384,819	
0	311311	Cadangan Piutang		1,966,307
0	311411	Cadangan Persediaan		288,606,170
0	311611	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	489,498,300	
0	321211	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		398,625,228,094
0	321311	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		14,565,599,145

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2	423116	Estimasi Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan	453,950,000	
2	423129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	15,000,000	
2	423141	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	1,000,000,000	
2	423216	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan	515,000,000	
2	423221	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Yang Dialokasikan	5,000,000	
2	423291	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan	5,000,000,000	
2	423911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Yang Dialokasikan	50,000,000	
2	423922	Estimasi Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh	10,000,000	
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		19,002,692,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		491,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		1,356,952,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		429,057,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		2,136,680,000
2	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS		1,287,327,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		1,123,774,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		1,350,000,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		3,811,368,000
2	511134	Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		3,004,160,000
2	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar		157,419,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		612,472,000
2	512211	Allotment Belanja Uang Lembur		386,820,000
2	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)		21,037,768,000
2	512412	Allotment Belanja Pegawai Transito		200,000,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		4,076,529,000
2	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		584,818,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		168,315,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		675,650,000
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		342,004,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		14,738,653,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		4,122,115,000
2	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya		13,556,364,000
2	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik		5,200,420,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		189,600,000
2	522113	Allotment Belanja Langganan Air		40,200,000
2	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan		166,000,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		1,184,820,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		4,444,634,000

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya		1,241,943,000
2	523111	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1,721,356,000
2	523119	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya		145,675,000
2	523121	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1,360,133,000
2	523129	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		948,237,000
2	523199	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya		8,070,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		980,788,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota		729,296,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		4,121,049,000
2	524119	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya		16,503,378,000
2	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri		194,461,000
2	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		2,171,597,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8,244,257,000
2	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		23,840,685,000
2	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan		5,177,781,000
2	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya		2,582,880,000
3	423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil		277,987,900
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		8,100,000
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		1,441,950,000
3	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi Sesuai		533,325,000
3	423291	Pendapatan Jasa Lainnya		5,265,184,919
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		1,260,299
3	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL		249,700,509
3	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL		97,318,361
3	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara		9,487,288
3	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		20,543
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,494,505,320	
3	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS		14,192,400
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	464,864	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		158,663
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,296,506,200	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	366,571,550	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,867,710,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	955,145,000	
3	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		825,000
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	633,753,153	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,116,939,120	

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,613,129,000	
3	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS		16,525,950
3	511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	2,554,800,000	
3	511134	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		1,500,000
3	511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	41,389,200	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	477,750,000	
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		1,105,000
3	512211	Belanja Uang Lembur	250,081,000	
3	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	19,979,758,750	
3	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)		521,511,928
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,069,673,073	
3	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	514,407,000	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	121,964,850	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	673,836,800	
3	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		600,000
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	331,833,048	
3	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya		237,500
3	521211	Belanja Bahan	14,133,084,747	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,849,944,725	
3	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan		18,572,500
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,823,292,749	
3	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya		4,210,000
3	522111	Belanja Langganan Listrik	5,181,555,779	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	166,131,172	
3	522113	Belanja Langganan Air	30,731,540	
3	522131	Belanja Jasa Konsultan	136,000,000	
3	522141	Belanja Sewa	927,662,000	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	3,915,395,000	
3	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi		48,505,000
3	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,111,810,000	
3	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya		1,518,000
3	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,699,425,571	
3	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	144,989,340	
3	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,346,025,209	
3	523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	751,129,900	
3	523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	5,970,000	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	960,946,200	

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		19,933,700
3	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	535,899,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,743,206,400	
3	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		8,656,000
3	524119	Belanja Perjalanan Lainnya	14,938,497,993	
3	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya		1,164,414,244
3	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	194,453,080	
3	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,858,057,900	
3	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		113,869,506
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,789,493,200	
3	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	16,418,920,019	
3	534131	Belanja Modal Jaringan	4,313,225,410	
3	536111	Belanja Modal Lainnya	2,209,861,820	
		J U M L A H	802,208,308,401	802,208,308,401

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
 Tanggal : 23/04/14
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,023,912,700	2,020,211,749	3,700,951	0.18
Uang Muka dari KPPN	118,300	11,940,000	(11,821,700)	(99.01)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	0	343,000,000	(343,000,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,024,031,000	2,375,151,749	(351,120,749)	(14.78)
JUMLAH KEWAJIBAN	2,024,031,000	2,375,151,749	(351,120,749)	(14.78)
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	1,966,307	224,984,246	(223,017,939)	(99.13)
Cadangan Persediaan	288,606,170	670,406,839	(381,800,669)	(56.95)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(489,498,300)	(338,456,749)	(151,041,551)	44.63
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	(198,925,823)	556,934,336	(755,860,159)	(64.28)
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	398,625,228,094	569,940,089,786	(171,314,861,692)	(30.06)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	14,565,599,145	12,948,987,831	1,616,611,314	12.48
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	413,190,827,239	582,889,077,617	(169,698,250,378)	(29.11)
JUMLAH EKUITAS DANA	412,991,901,416	583,446,011,953	(170,454,110,537)	(29.22)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	415,015,932,416	585,821,163,702	(170,805,231,286)	(29.16)

Jakarta, April 2014
 Kuasa Pengguna Anggaran



Gina Masudah Husni
 NIP. 19550701 198303 2 001

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	118,300	11,940,000	(11,821,700)	(99.01)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	343,000,000	(343,000,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,534,414,400	1,681,755,000	(147,340,600)	(8.76)
Piutang Bukan Pajak	0	223,150,531	(223,150,531)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(1,115,752)	1,115,752	(100.00)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>0</i>	<i>222,034,779</i>	<i>(222,034,779)</i>	<i>(100.00)</i>
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,976,188	2,964,288	(988,100)	(33.33)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(9,881)	(14,821)	4,940	(33.33)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>1,966,307</i>	<i>2,949,467</i>	<i>(983,160)</i>	<i>(33.33)</i>
Persediaan	288,606,170	670,406,839	(381,800,669)	(56.95)
JUMLAH ASET LANCAR	1,825,105,177	2,932,086,085	(1,106,980,908)	(37.75)
ASET TETAP				
Tanah	215,554,860,396	215,554,860,396	0	0.00
Peralatan dan Mesin	171,558,428,270	157,278,538,416	14,279,889,854	9.08
Gedung dan Bangunan	188,514,743,536	175,871,756,557	12,642,986,979	7.19
Jalan, Irigasi dan Jaringan	16,240,117,839	13,419,676,529	2,820,441,310	21.02
Aset Tetap Lainnya	7,924,247,888	7,815,257,888	108,990,000	1.39
Akumulasi Penyusutan	(201,167,169,835)	0	(201,167,169,835)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	398,625,228,094	569,940,089,786	(171,314,861,692)	(30.06)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	1,976,188	(1,976,188)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(9,881)	9,881	(100.00)
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>0</i>	<i>1,966,307</i>	<i>(1,966,307)</i>	<i>(100.00)</i>
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	1,966,307	(1,966,307)	(100.00)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	14,565,599,145	12,659,577,325	1,906,021,820	15.06
Aset Lain-lain	287,444,199	287,444,199	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(287,444,199)	0	(287,444,199)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	14,565,599,145	12,947,021,524	1,618,577,621	12.50
JUMLAH ASET	415,015,932,416	585,821,163,702	(170,805,231,286)	(29.16)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,023,912,700	2,020,211,749	3,700,951	0.18

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Uang Muka dari KPPN	118,300	11,940,000	(11,821,700)	(99.01)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	0	343,000,000	(343,000,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,024,031,000	2,375,151,749	(351,120,749)	(14.78)
JUMLAH KEWAJIBAN	2,024,031,000	2,375,151,749	(351,120,749)	(14.78)
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	1,966,307	224,984,246	(223,017,939)	(99.13)
Cadangan Persediaan	288,606,170	670,406,839	(381,800,669)	(56.95)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(489,498,300)	(338,456,749)	(151,041,551)	44.63
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	(198,925,823)	556,934,336	(755,860,159)	(64.28)
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	398,625,228,094	569,940,089,786	(171,314,861,692)	(30.06)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	14,565,599,145	12,948,987,831	1,616,611,314	12.48
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	413,190,827,239	582,889,077,617	(169,698,250,378)	(29.11)
JUMLAH EKUITAS DANA	412,991,901,416	583,446,011,953	(170,454,110,537)	(29.22)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	415,015,932,416	585,821,163,702	(170,805,231,286)	(29.16)

Jakarta, April 2014
Kuasa Pengguna Anggaran

Gina Masudah Husni
NIP. 19550701 198303 2 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)**

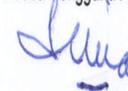
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 23 April 2014
Halaman : 2
Prog.id : lu_pauait

No	URAIAN	2013				2012			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	175,358,688,000	153,609,591,291	(21,749,096,709)	87.60	151,599,942,000	122,172,427,640	(29,427,514,360)	80.59
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, April 2014

Kuasa Pengguna Anggaran



Gina Masudah Husni

NIP. 19550701 198303 2 001

BERKAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)

REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pauait

No	URAIAN	2013				2012			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	7,048,950,000	7,884,334,819	835,384,819	111.85	6,921,083,000	7,863,573,309	942,490,309	113.62
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	7,048,950,000	7,884,334,819	835,384,819	111.85	6,921,083,000	7,863,573,309	942,490,309	113.62
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,048,950,000	7,884,334,819	835,384,819	111.85	6,921,083,000	7,863,573,309	942,490,309	113.62
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	7,048,950,000	7,884,334,819	835,384,819	111.85	6,921,083,000	7,863,573,309	942,490,309	113.62
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	175,358,688,000	153,609,591,291	(21,749,096,709)	87.60	151,599,942,000	122,172,427,640	(29,427,514,360)	80.59
B.I.1	Rupiah Murni	175,358,688,000	153,609,591,291	(21,749,096,709)	87.60	151,599,942,000	122,172,427,640	(29,427,514,360)	80.59
B.I.1.a	Belanja Pegawai	55,896,980,000	50,092,684,216	(5,804,295,784)	89.62	52,386,022,000	50,065,592,333	(2,320,429,667)	95.57
B.I.1.b	Belanja Barang	79,616,105,000	72,785,406,626	(6,830,698,374)	91.42	69,704,203,000	62,624,676,422	(7,079,526,578)	89.84
B.I.1.c	Belanja Modal	39,845,603,000	30,731,500,449	(9,114,102,551)	77.13	29,509,717,000	9,482,158,885	(20,027,558,115)	32.13
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

REPORTAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)

REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pauait

No	URAIAN	2013				2012			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	175,358,688,000	153,609,591,291	(21,749,096,709)	87.60	151,599,942,000	122,172,427,640	(29,427,514,360)	80.59
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, April 2014

Kuasa Pengguna Anggaran

Gina Masudah Husni
NIP. 19550701 198303 2 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 2
Prog.Id : lu_Irabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	ARSIP NASIONAL	154,180,812,000	175,358,688,000	32,967,251,572	155,545,926,682	(1,936,335,391)	153,609,591,291	88.70	19,812,761,318
	JUMLAH BELANJA	154,180,812,000	175,358,688,000	32,967,251,572	155,545,926,682	(1,936,335,391)	153,609,591,291	88.70	19,812,761,318
	III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH								
0199	INSTANSI PUSAT	145,880,812,000	167,058,688,000	32,074,963,523	147,545,950,679	(1,914,822,991)	145,631,127,688	88.32	19,512,737,321
0100	Prop. DKI Jakarta	170,000,000	170,000,000	10,075,000	156,930,000	0	156,930,000	92.31	13,070,000
0200	Prop. Jawa Barat	177,466,000	177,466,000	0	172,912,000	0	172,912,000	97.43	4,554,000
0300	Prop. Jawa Tengah	175,657,000	175,657,000	0	173,449,600	0	173,449,600	98.74	2,207,400
0400	Prop. D.I. Yogyakarta	154,791,000	154,791,000	0	149,692,900	0	149,692,900	96.71	5,098,100
0500	Prop. Jawa Timur	167,706,000	167,706,000	0	157,482,625	0	157,482,625	93.90	10,223,375
0600	Prop. D.I. Aceh	2,868,291,000	2,868,291,000	393,142,549	2,782,453,528	(14,989,900)	2,767,463,628	97.01	85,837,472
0700	Prop. Sumatera Utara	160,966,000	160,966,000	147,460,100	147,460,100	0	147,460,100	91.61	13,505,900
0800	Prop. Sumatera Barat	163,351,000	163,351,000	18,796,000	157,787,900	0	157,787,900	96.59	5,563,100
0900	Prop. Riau	180,031,000	180,031,000	0	173,033,200	0	173,033,200	96.11	6,997,800
1000	Prop. Jambi	154,417,000	154,417,000	150,960,100	150,960,100	0	150,960,100	97.76	3,456,900
1100	Prop. Sumatera Selatan	156,026,000	156,026,000	0	152,619,800	0	152,619,800	97.82	3,406,200
1200	Prop. Lampung	149,413,000	149,413,000	0	140,806,800	0	140,806,800	94.24	8,606,200
1300	Prop. Kalimantan Barat	169,106,000	169,106,000	31,924,300	168,850,300	0	168,850,300	99.85	255,700
1400	Prop. Kalimantan Tengah	157,171,000	157,171,000	0	153,684,900	0	153,684,900	97.78	3,486,100
1500	Prop. Kalimantan Selatan	167,291,000	167,291,000	34,813,700	146,374,700	(3,550,000)	142,824,700	87.50	20,916,300
1600	Prop. Kalimantan Timur	177,596,000	177,596,000	0	166,711,600	0	166,711,600	93.87	10,884,400



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 3
Prog.Id : lu_rabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1700	prop. Sulawesi Utara	201,846,000	201,846,000	0	191,586,000	0	191,586,000	94.92	10,260,000
1800	Prop. Sulawesi Tengah	167,856,000	167,856,000	6,000,000	165,996,000	0	165,996,000	98.89	1,860,000
1900	Prop. Sulawesi Selatan	197,041,000	197,041,000	0	197,041,000	0	197,041,000	100.00	0
2000	Prop. Sulawesi Tenggara	149,951,000	149,951,000	0	141,947,200	0	141,947,200	94.66	8,003,800
2100	Prop. Maluku	180,066,000	180,066,000	0	160,201,300	0	160,201,300	88.97	19,864,700
2200	Prop. Bali	194,990,000	194,990,000	0	188,447,200	0	188,447,200	96.64	6,542,800
2300	Prop. Nusa Tenggara Barat	164,046,000	164,046,000	44,323,300	150,426,300	0	150,426,300	91.70	13,619,700
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	173,316,000	173,316,000	3,943,000	172,036,400	(6,000)	172,030,400	99.26	1,279,600
2500	Prop. Irian Jaya	180,541,000	180,541,000	0	179,630,000	0	179,630,000	99.50	911,000
2600	Prop. Bengkulu	152,476,000	152,476,000	39,238,000	146,306,100	0	146,306,100	95.95	6,169,900
2800	Prop. Maluku Utara	149,576,000	149,576,000	0	148,245,000	(1,665,300)	146,579,700	99.11	1,331,000
2900	Prop. Banten	166,436,000	166,436,000	0	158,868,000	0	158,868,000	95.45	7,568,000
3000	Prop. Bangka Belitung	170,726,000	170,726,000	0	168,641,100	(1,200,000)	167,441,100	98.78	2,084,900
3100	Prop. Gorontalo	166,936,000	166,936,000	11,612,000	152,816,800	0	152,816,800	91.54	14,119,200
3200	Prop. Kepulauan Riau	156,041,000	156,041,000	0	147,700,550	(101,200)	147,599,350	94.66	8,340,450
3300	PAPUA BARAT	193,716,000	193,716,000	0	193,716,000	0	193,716,000	100.00	0
3400	PROP. SULAWESI BARAT	185,161,000	185,161,000	0	185,161,000	0	185,161,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA	154,180,812,000	175,358,688,000	32,967,251,572	155,545,926,682	(1,936,335,391)	153,609,591,291	88.70	19,812,761,318
	IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,002,692,000	19,002,692,000	1,411,999,900	18,494,505,320	(14,192,400)	18,480,312,920	97.33	508,186,680

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 4
Prog.Id : lu_lrabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	491,000	491,000	134,874	464,864	(158,663)	306,201	94.68	26,136
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,356,952,000	1,356,952,000	100,667,280	1,296,506,200	0	1,296,506,200	95.55	60,445,800
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	429,057,000	429,057,000	28,219,724	366,571,550	0	366,571,550	85.44	62,485,450
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,136,680,000	2,136,680,000	142,740,000	1,867,710,000	0	1,867,710,000	87.41	268,970,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	790,400,000	1,287,327,000	81,565,000	955,145,000	(825,000)	954,320,000	74.20	332,182,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,123,774,000	1,123,774,000	30,845,924	633,753,153	0	633,753,153	56.40	490,020,847
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	946,927,000	1,350,000,000	123,028,800	1,116,939,120	0	1,116,939,120	82.74	233,060,880
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,811,368,000	3,811,368,000	354,294,000	2,613,129,000	(16,525,950)	2,596,603,050	68.56	1,198,239,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,004,160,000	3,004,160,000	228,900,000	2,554,800,000	(1,500,000)	2,553,300,000	85.04	449,360,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	157,419,000	13,430,400	41,389,200	0	41,389,200	26.29	116,029,800
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	612,472,000	612,472,000	35,855,000	477,750,000	(1,105,000)	476,645,000	78.00	134,722,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	33,214,973,000	34,272,392,000	2,551,680,902	30,418,663,407	(34,307,013)	30,384,356,394	88.76	3,853,728,593
5122	Belanja Lembur								
512211	Belanja Uang Lembur	386,820,000	386,820,000	15,104,000	250,081,000	0	250,081,000	64.65	136,739,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	386,820,000	386,820,000	15,104,000	250,081,000	0	250,081,000	64.65	136,739,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito								
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	21,037,768,000	3,068,828,800	19,979,758,750	(521,511,928)	19,458,246,822	94.97	1,058,009,250
512412	Belanja Pegawai Transito	1,257,419,000	200,000,000	0	0	0	0	0.00	200,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,257,419,000	21,237,768,000	3,068,828,800	19,979,758,750	(521,511,928)	19,458,246,822	94.08	1,258,009,250
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	34,859,212,000	55,896,980,000	5,635,613,702	50,648,503,157	(555,818,941)	50,092,684,216	90.61	5,248,476,843
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,272,899,000	4,076,529,000	741,840,523	4,069,673,073	0	4,069,673,073	99.83	6,855,927

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 5
Prog.Id : lu_irabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	747,038,000	584,818,000	70,550,000	514,407,000	0	514,407,000	87.96	70,411,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	92,585,000	168,315,000	38,590,000	121,964,850	0	121,964,850	72.46	46,350,150
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	692,055,000	675,650,000	144,260,000	673,836,800	(600,000)	673,236,800	99.73	1,813,200
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	400,634,000	342,004,000	51,840,000	331,833,048	(237,500)	331,595,548	97.03	10,170,952
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,205,211,000	5,847,316,000	1,047,080,523	5,711,714,771	(837,500)	5,710,877,271	97.68	135,601,229
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	13,825,257,000	14,738,653,000	1,960,051,900	14,133,084,747	0	14,133,084,747	95.89	605,568,253
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,624,285,000	4,122,115,000	838,724,820	3,849,944,725	(18,572,500)	3,831,372,225	93.40	272,170,275
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,562,778,000	13,556,364,000	2,406,903,100	12,823,292,749	(4,210,000)	12,819,082,749	94.59	733,071,251
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	37,012,320,000	32,417,132,000	5,205,679,820	30,806,322,221	(22,782,500)	30,783,539,721	95.03	1,610,809,779
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	5,133,000,000	5,200,420,000	498,714,832	5,181,555,779	0	5,181,555,779	99.64	18,864,221
522112	Belanja Langganan Telepon	201,600,000	189,600,000	10,074,715	166,131,172	0	166,131,172	87.62	23,468,828
522113	Belanja Langganan Air	43,800,000	40,200,000	12,445,095	30,731,540	0	30,731,540	76.45	9,468,460
522131	Belanja Jasa Konsultan	212,000,000	166,000,000	12,000,000	136,000,000	0	136,000,000	81.93	30,000,000
522141	Belanja Sewa	821,990,000	1,184,820,000	245,316,100	927,662,000	0	927,662,000	78.30	257,158,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,370,856,000	4,444,634,000	616,345,000	3,915,395,000	(48,505,000)	3,866,890,000	88.09	529,239,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,428,900,000	1,241,943,000	94,341,000	1,111,810,000	(1,518,000)	1,110,292,000	89.52	130,133,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,212,146,000	12,467,617,000	1,489,236,742	11,469,285,491	(50,023,000)	11,419,262,491	91.99	998,331,509
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,893,404,000	1,721,356,000	844,731,213	1,699,425,571	0	1,699,425,571	98.73	21,930,429
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	145,675,000	145,675,000	132,945,000	144,989,340	0	144,989,340	99.53	685,660
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	954,895,000	1,360,133,000	276,703,200	1,346,025,209	0	1,346,025,209	98.96	14,107,791

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 6
Prog.Id : lu_rabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753,237,000	948,237,000	137,580,350	751,129,900	0	751,129,900	79.21	197,107,100
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	8,070,000	8,070,000	5,970,000	5,970,000	0	5,970,000	73.98	2,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,755,281,000	4,183,471,000	1,397,929,763	3,947,540,020	0	3,947,540,020	94.36	235,930,980
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	824,689,000	980,788,000	396,735,300	960,946,200	(19,933,700)	941,012,500	97.98	19,841,800
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3,960,000	729,296,000	232,610,000	535,899,000	0	535,899,000	73.48	193,397,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	146,310,000	4,121,049,000	1,051,481,000	3,743,206,400	(8,656,000)	3,734,550,400	90.83	377,842,600
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	16,298,097,000	16,503,378,000	1,471,483,743	14,938,497,993	(1,164,414,244)	13,774,083,749	90.52	1,564,880,007
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,273,056,000	22,334,511,000	3,152,310,043	20,178,549,593	(1,193,003,944)	18,985,545,649	90.35	2,155,961,407
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	347,400,000	194,461,000	60,034,000	194,453,080	0	194,453,080	100.00	7,920
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2,503,189,000	2,171,597,000	334,261,500	1,858,057,900	(113,869,506)	1,744,188,394	85.56	313,539,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	2,850,589,000	2,366,058,000	394,295,500	2,052,510,980	(113,869,506)	1,938,641,474	86.75	313,547,020
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	79,308,603,000	79,616,105,000	12,686,532,391	74,165,923,076	(1,380,516,450)	72,785,406,626	93.15	5,450,181,924
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,366,593,000	8,244,257,000	1,624,406,500	7,789,493,200	0	7,789,493,200	94.48	454,763,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	8,366,593,000	8,244,257,000	1,624,406,500	7,789,493,200	0	7,789,493,200	94.48	454,763,800
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	23,961,719,000	23,840,685,000	9,151,389,389	16,418,920,019	0	16,418,920,019	68.87	7,421,764,981
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	23,961,719,000	23,840,685,000	9,151,389,389	16,418,920,019	0	16,418,920,019	68.87	7,421,764,981
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan								
534131	Belanja Modal Jaringan	5,277,781,000	5,177,781,000	3,371,279,590	4,313,225,410	0	4,313,225,410	83.30	864,555,590
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	5,277,781,000	5,177,781,000	3,371,279,590	4,313,225,410	0	4,313,225,410	83.30	864,555,590



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 7
Prog.Id : lu_lrabi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	2,406,904,000	2,582,880,000	498,030,000	2,209,861,820	0	2,209,861,820	85.56	373,018,180
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	2,406,904,000	2,582,880,000	498,030,000	2,209,861,820	0	2,209,861,820	85.56	373,018,180
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	40,012,997,000	39,845,603,000	14,645,105,479	30,731,500,449	0	30,731,500,449	77.13	9,114,102,551
	JUMLAH BELANJA	154,180,812,000	175,358,688,000	32,967,251,572	155,545,926,682	(1,936,335,391)	153,609,591,291	88.70	19,812,761,318

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 1
Prog.Id : lu_trapbi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA							
01	RUPIAH MURNI							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	0	0	629,380,202	130,867,005	760,247,207	0.00	0
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	0	0	665,772,193	475,719,891	1,141,492,084	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01	0	0	1,295,152,395	606,586,896	1,901,739,291	0.00	0
06	PEMBANGUNAN DAERAH							
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	0	0	0	101,200	101,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06	0	0	0	101,200	101,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	1,295,152,395	606,688,096	1,901,840,491	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	1,295,152,395	606,688,096	1,901,840,491	0.00	0
04	PNBP							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	0	0	5,035,400	29,459,500	34,494,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01	0	0	5,035,400	29,459,500	34,494,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	5,035,400	29,459,500	34,494,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 04	0	0	5,035,400	29,459,500	34,494,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	1,300,187,795	636,147,596	1,936,335,391	0.00	0
	II. IKHTISAR MENURUT ESELON I							
01	ARSIP NASIONAL	0	0	1,300,187,795	636,147,596	1,936,335,391	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 2
Prog.Id : lu_lrapbi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	1,300,187,795	636,147,596	1,936,335,391	0.00	0
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH								
0199	INSTANSI PUSAT	0	0	1,285,121,395	629,701,596	1,914,822,991	0.00	0
0600	Prop. D.I. Aceh	0	0	13,866,400	1,123,500	14,989,900	0.00	0
1500	Prop. Kalimantan Selatan	0	0	0	3,550,000	3,550,000	0.00	0
2400	Prop. Nusa Tenggara Timur	0	0	0	6,000	6,000	0.00	0
2800	Prop. Maluku Utara	0	0	0	1,665,300	1,665,300	0.00	0
3000	Prop. Bangka Belitung	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0.00	0
3200	Prop. Kepulauan Riau	0	0	0	101,200	101,200	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	1,300,187,795	636,147,596	1,936,335,391	0.00	0
IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK								
51	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI							
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	8,908,200	5,284,200	14,192,400	0.00	0
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	56,002	102,661	158,663	0.00	0
511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	825,000	0	825,000	0.00	0
511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	0	16,525,950	0	16,525,950	0.00	0
511134	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0.00	0
511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0	1,105,000	0	1,105,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	28,920,152	5,386,861	34,307,013	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 3
Prog.Id : lu_irapbi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5124	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	0	479,087,000	42,424,928	521,511,928	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124	0	0	479,087,000	42,424,928	521,511,928	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	508,007,152	47,811,789	555,818,941	0.00	0
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5211	Pengembalian Belanja Barang Operasional							
521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0	600,000	600,000	0.00	0
521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	0	0	237,500	237,500	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	0	0	837,500	837,500	0.00	0
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional							
521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	480,000	18,092,500	18,572,500	0.00	0
521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	1,200,000	3,010,000	4,210,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	0	1,680,000	21,102,500	22,782,500	0.00	0
5221	Pengembalian Belanja Jasa							
522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	0	41,620,000	6,885,000	48,505,000	0.00	0
522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	0	1,518,000	0	1,518,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	0	43,138,000	6,885,000	50,023,000	0.00	0
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	14,059,900	5,873,800	19,933,700	0.00	0
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	410,000	8,246,000	8,656,000	0.00	0
524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya	0	0	677,229,613	487,184,631	1,164,414,244	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	691,699,513	501,304,431	1,193,003,944	0.00	0
5242	Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	55,663,130	58,206,376	113,869,506	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 02 Mei 2014
Halaman : 4
Prog.Id : lu_lrapbi1b

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	0	55,663,130	58,206,376	113,869,506	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	792,180,643	588,335,807	1,380,516,450	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	1,300,187,795	636,147,596	1,936,335,391	0.00	0